

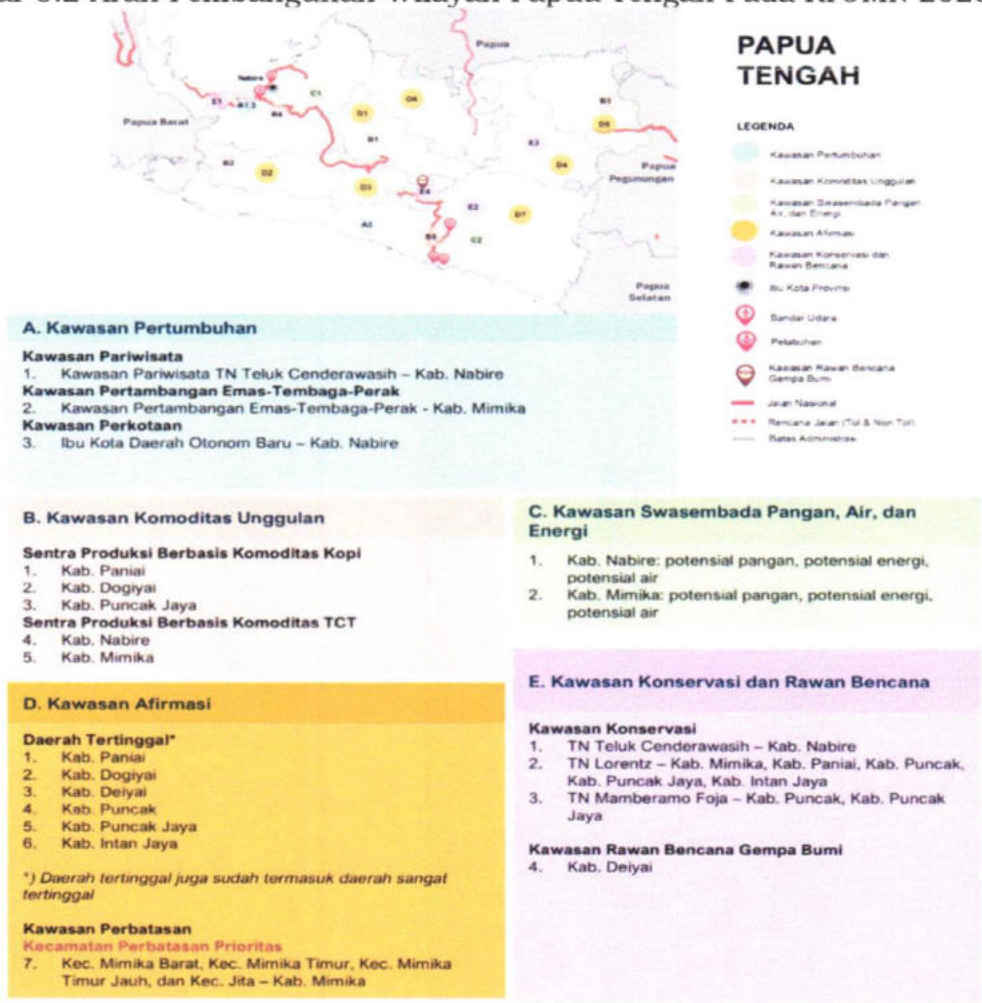
Tujuan / Sasaran				Strategi			Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
M7	T10	S17	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	S57	Mitigasi Perubahan Iklim dan Penurunan Emisi GRK : 1. Pengurangan deforestasi dan degradasi hutan melalui perlindungan kawasan hutan serta penguatan regulasi terhadap aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan alih fungsi lahan; 2. Pengembangan energi bersih dan rendah karbon, seperti penggunaan energi surya, bioenergi, dan tenaga air untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil; 3. Penerapan pertanian dan peternakan berkelanjutan dengan teknik agroforestri, pertanian rendah emisi, serta efisiensi dalam penggunaan pupuk dan pestisida; 4. Pengelolaan sampah dan limbah secara berkelanjutan, termasuk pengurangan sampah plastik, peningkatan daur ulang, dan pemanfaatan limbah organik sebagai sumber energi terbarukan; 5. Mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan sistem transportasi berbasis energi hijau.		1. Implementasi kebijakan nol deforestasi dan peningkatan peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan; 2. Penyusunan regulasi yang mendorong industri di Papua Tengah untuk menerapkan produksi rendah karbon; 3. Meningkatkan investasi dalam sektor energi terbarukan dan transportasi rendah emisi; 4. Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam aksi mitigasi perubahan iklim.		Dinas Perindagkop, Dinas P2KP, BPBD, DLHK, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Nakertrans ESDA, Dinas Sosial-P3A, Bapperida, Dinas PUPR, Dinas LHK
				S58	Adaptasi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim : 1. Penguatan sistem peringatan dini terhadap bencana alam dengan membangun pusat informasi bencana dan memperkuat sistem pemantauan cuaca dan iklim; 2. Pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti tanggul, waduk pengendali banjir, dan rumah tahan gempa di daerah rawan bencana; 3. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk pelatihan		1. Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, dan lembaga kebencanaan nasional dalam penanggulangan bencana; 2. Mewajibkan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan standar ketahanan bencana dan adaptasi iklim; 3. Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana dan perubahan		BPBD, Dinas Kominfostadi, DLHK, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Nakertrans ESDA, Dinas Sosial-P3A, Bapperida, Dinas PUPR, Dinas LHK

Tujuan / Sasaran				Strategi			Arah Kebijakan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan darurat berbasis komunitas; 4. Pengelolaan tata ruang berbasis risiko bencana, memastikan pembangunan tidak dilakukan di zona rentan bencana seperti daerah rawan banjir dan longsor; 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan anggaran untuk penanganan bencana, termasuk dana cadangan bencana yang memadai.		iklim; 4. Mendorong investasi dalam penelitian dan teknologi adaptasi iklim untuk sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.		

Sumber Data : Bapprieda Papua Tengah (Data diolah, 2025)

- 3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan
1. Arah Pembangunan Wilayah Dalam Lingkup Nasional dan Provinsi
- 1) Arah Pembangunan Wilayah dalam Lingkup Nasional (RPJMN)
- RPJMN sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional memiliki arah yang jelas untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, termasuk wilayah Papua Tengah. Arah pembangunan ini mencakup beberapa fokus utama yang sesuai dengan konteks Papua Tengah, di antaranya :
- Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Nasional: Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, termasuk Papua Tengah, menjadi prioritas nasional. Ini meliputi pembangunan jalan, transportasi laut, udara, dan digital, yang mendukung penghubungan antara wilayah Papua dengan daerah lainnya, serta meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas.
 - Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal: RPJMN mendorong penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan lokal seperti pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Untuk Papua Tengah, fokus pada potensi sumber daya alam dan keunggulan sektor pariwisata yang khas dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi.
 - Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM): Peningkatan kualitas SDM di seluruh Indonesia menjadi bagian penting dari RPJMN. Ini sejalan dengan upaya Papua Tengah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat, agar siap berkompetisi dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
- Adapun arah pembangunan wilayah dalam Lingkup Nasional (RPJMN) yang akan dilaksanakan pada Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar di Bawah ini:

Gambar 3.2 Arah Pembangunan Wilayah Papua Tengah Pada RPJMN 2025-2029



Sumber Data : RPJM Nasional 2025-2029

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Tengah Pada RPJMN

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	7,7	119,5	0,7	26,50 – 27,00	0,380 – 0,383	0,42	59,28	82,56	2,65 – 3,12
	(Rata-rata 2025-2029)								
2029	8,6	179,4	0,8	15,50 – 16,50	0,374 – 0,380	0,45	78,99	83,20	2,00 – 2,40
	(2029)								

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tabel 3.5 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Papua Tengah Pada Dokumen RPJMN 2025-2029

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
Kawasan Pertumbuhan: A3: Ibu Kota Daerah Otonomi Baru (Kab. Nabire)		Pengembangan Kab. Nabire sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Tengah, melalui: - Percepatan pengembangan dan penataan kawasan pusat pemerintahan ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Tengah, dengan <i>output</i>: pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pusat pemerintahan serta pembebasan lahan - Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan <i>output</i>: rencana induk (masterplan) - Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Douw Aturure Nabire - Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan <i>output</i>: pembangunan SPAM, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya - Penataan kawasan
Kawasan Pertumbuhan: A1: Kawasan Pariwisata TN Teluk Cenderawasih (Kab. Nabire)		Penyiapan kawasan pariwisata TN Teluk Cenderawasih di Kab. Nabire, melalui: - Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan daerah - Pengembangan atraksi, dengan <i>output</i>: pendudukan <i>event</i> daerah dan pengembangan desa wisata - Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan spam dan sistem pengelolaan air limbah domestik - Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam
Kawasan Pertumbuhan: A2: Kawasan pertambangan emas-tembaga-perak (Kab. Mimika)		Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui hilirisasi industri berbasis SDA (emas, tembaga, dan perak) berorientasi ekspor di Kab. Mimika, melalui: - Peningkatan investasi dan ekspor - Fasilitasi kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan <i>output</i>: penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan, pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri, serta peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka - Peningkatan SDM berkualitas, dengan <i>output</i>: fasilitasi pendampingan SMK yang <i>link and match</i> dengan industri, serta pelatihan vokasi industri <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> - Penguatan implementasi penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan, melalui: reklamasi pasca tambang

Lokasi Prioritas							<i>Highlight</i>	Indikasi Intervensi			
Provinsi Papua Tengah											

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
- Kab. Mimika (perikanan dan pertambangan) - Kab. Paniai (perkebunan) - Kab. Dogiyai(perkebunan) - Kab. Puncak Jaya (perkebunan) - Kab. Nabire (perikanan dan pariwisata)	Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan) sesuai kebutuhan DUDI, melalui: - Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan serta pelatihan berkualitas, dengan <i>output</i>: jalan menuju fasilitas pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai latihan kerja (BLK) - Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta SMK yang mengacu pada kebutuhan industri - Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri - Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan <i>output</i>: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja
Kawasan Potensial Swasembada Pangan: - C1: Kab. Nabire* (padi dan pangan akuatik) - C2: Kab. Mimika* (padi, sagu, dan pangan akuatik) Kawasan Rentan Pangan: - Kab. Puncak Jaya** (ubi dan babi) - Kab. Intan Jaya** (ubi) - Kab. Dogiyai** (ubi dan hortikultura) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi	Penguatan kawasan potensial swasembada pangan berbasis pertanian tanaman pangan (padi dan sagu) serta pangan akuatik/ <i>bluefood</i> berbasis perikanan tangkap, melalui: - Peningkatan produksi, dengan <i>output</i>: pengembangan kawasan padi dan sagu, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pemberian pupuk bersubsidi, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, serta penyaluran benih ikan air laut - Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan pangan lokal, dengan <i>output</i>: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta pembangunan fasilitas logistik (gudang lumbung pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi - Penguatan kapasitas SDM (petani dan nelayan), dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk GAP (<i>Good Agriculture Practices</i>), GHP (<i>Good Handling Practices</i>), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok

Lokasi Prioritas			Highlight Indikasi Intervensi		
***) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan			pelaku utama, serta mendorong <i>ownership</i> petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas di kalangan kelompok strategis, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan <i>output</i> : pengembangan kawasan ubi dan hortikultura, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang difasilitasi penganekaragaman pangan, pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, bantuan ternak babi, peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan		
Kawasan Potensial Swasembada Energi: - C1: Kab. Nabire* - C2: Kab. Mimika* Kawasan Rendah Elektrifikasi: - Kab. Puncak Jaya** - Kab. Intan Jaya** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik yang tinggi			Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, melalui: - Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan <i>output</i>: pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), dan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM), pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk - Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan <i>output</i> : pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T		
Kawasan Potensial Swasembada Air: - C1: Kab. Nabire* - C2: Kab. Mimika*			Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, melalui: Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air, dengan <i>output</i>: pembangunan embung dan tampungan air lainnya		

Lokasi Prioritas				Highlight Indikasi Intervensi	
Kawasan Rawan Air: • Kab. Puncak** • Kab. Puncak Jaya** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi dan luas wilayah sungai yang besar **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan/atau merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air				Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan <i>output</i>: pembangunan embung, pembangunan sarana dan prasarana air baku, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air	
Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: • D1: Kab. Paniai (kopi) • D2: Kab. Dogiyai (kopi) • D3: Kab. Deiyai (kopi) • D4: Kab. Puncak (kopi) • D5: Kab. Puncak Jaya (kopi) • D6: Kab. Intan Jaya (kopi) *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal				Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang Yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya melalui: • Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan <i>output</i>: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan program afirmasi, aktivasi balai desa dengan pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif • Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, peningkatan akses pembiayaan modal, peningkatan sarana budi daya ikan laut yang disalurkan ke masyarakat, pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan kelompok pelaku utama/usaha, pengembangan UMKM lokal, peningkatan kemandirian masyarakat, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis • Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan; perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat; pengembangan SDM TIK dan	

Lokasi Prioritas							<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi				
							digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital; pembangunan jalan akses simpul ekonomi; serta pengembangan sarana angkutan perintis laut, darat, dan udara • Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, dengan <i>output</i>: masyarakat di daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana				
Kawasan Afirmasi Kawasan perbatasan Kecamatan perbatasan prioritas: • D7: Kec. Mimika Barat, Kec. Mimika Timur, Kec. Mimika Timur Jauh, dan Kec. Jita (Kab. Mimika)							Pengembangan kecamatan perbatasan prioritas (Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Jita , melalui: • Pemenuhan layanan dasar, dengan <i>output</i>: penyediaan rumah layak huni, penyediaan sarana pelayanan dasar, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik • Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: fasilitasi kampung siaga bencana terhadap warga masyarakat di lokasi rawan bencana, serta fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana alam di kawasan perbatasan. • Penguatan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: <i>piloting</i> pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN				
Pengembangan sekolah terbuka dan sekolah berpola asrama: • Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) Pengembangan sekolah terbuka: • Kab. Dogiyai (Daerah Tertinggal) • Kab. Deiyai (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) Pengembangan sekolah sepanjang hari:							Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui: • Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik , dengan <i>output</i>: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK serta pemberian beasiswa afirmasi menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan <i>output</i>: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA				

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
- Kab. Paniai (Daerah Sangat Tertinggal) Pengembangan sekolah berpola asrama: - Kab. Nabire - Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) - Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan: - Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah	- Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah - Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan <i>output</i>: pembinaan peningkatan kesetaraan pada satuan pendidikan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan - Peningkatan literasi, dengan <i>output</i>: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital - Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan <i>output</i>: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual
Provinsi Papua Tengah	Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui: - Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan dengan <i>output</i>: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan - Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan <i>output</i>: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya - Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah dengan <i>output</i>: <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokal - Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan <i>output</i>: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta <i>event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah
Pelayanan kesehatan bergerak: - Kab. Dogiyai (Daerah Tertinggal) - Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) - Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) - Kab. Puncak Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) Pembangunan RSUD provinsi: - Kab. Nabire Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C:	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: - Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, dengan <i>output</i>: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i> - Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan orang asli Papua, dengan <i>output</i>: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan

Lokasi Prioritas				Highlight Indikasi Intervensi	
- Kab. Puncak Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) - Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) - Kab. Deiyai (Daerah Sangat Tertinggal) - Kab. Dogiyai (Daerah Tertinggal) - Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: - Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah				primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular, serta pembangunan RSUD Provinsi Papua tengah - Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan - Penyediaan modal transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah - Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan	
Pengendalian penyakit malaria: - Kab. Paniai - Kab. Dogiyai - Kab. Intan Jaya - Kab. Deiyai - Kab. Puncak - Kab. Puncak Jaya - Kab. Nabire - Kab. Mimika Pengendalian penyakit TBC: - Kab. Paniai - Kab. Nabire Pengendalian filariasis kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: Provinsi Papua Tengah				Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui: - Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan, pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan kualitas hunian tidak layak - Eliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL - Eliminasi penyakit frambusia, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL - Eliminasi penyakit filariasis, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL - Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL - Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS	
Provinsi Papua Tengah				Penguatan percepatan pencegahan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya melalui: Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua	

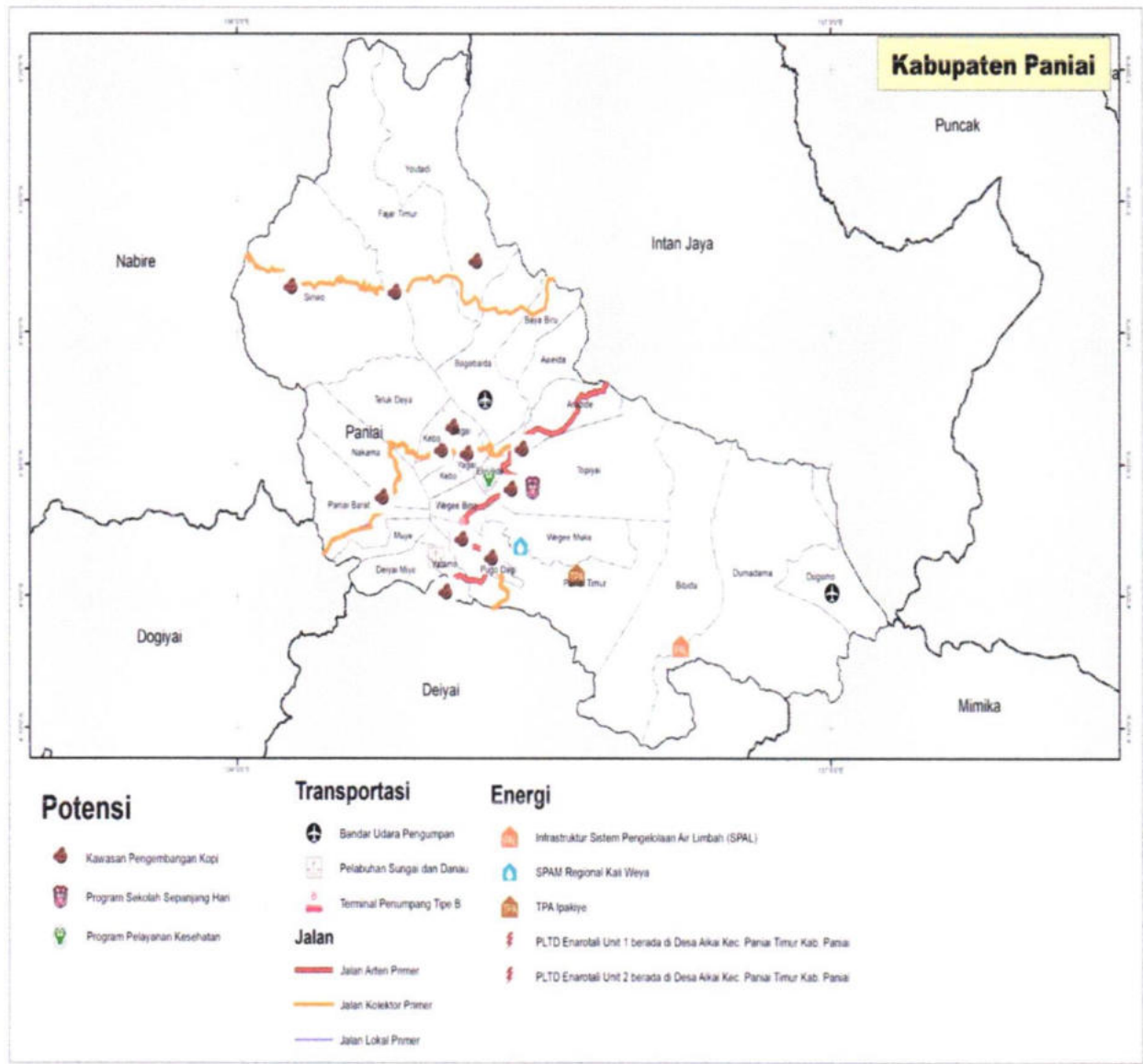
Lokasi Prioritas							<i>Highlight</i>	Indikasi Intervensi			
Pemberantasan IUU Fishing: - WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau) - WPP 718 (perbatasan perairan dengan Australia) Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah: - Provinsi Papua Tengah											

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
		• Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut
Provinsi Papua Tengah		Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah ulayat, melalui: • Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan <i>output</i>: peningkatan data inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat • Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan <i>output</i>: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil • Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta deliniasi tanah ulayat
Kawasan Konservasi: • E1: TN Teluk Cenderawasih (Kab. Nabire) • E2: TN Lorentz (Kab. Mimika, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, dan Kab. Paniai) • E3: TN Mamberamo Foja (Kab. Puncak dan Kab. Puncak Jaya)		Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: • Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21 • Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi • Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan <i>output</i>: inventarisasi keterancaman spesies dan konservasi biota yang terancam punah. • Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) • Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem
Lingkungan Hidup: • Provinsi Papua Tengah		Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui:

Lokasi Prioritas				Highlight Indikasi Intervensi	
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: E4: Kab. Deiyai				• peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim • Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, penerapan <i>nature-based solutions</i>, serta retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik • Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan <i>output</i>: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa • Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan <i>output</i>: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan, serta reklamasi pascatambang	
Provinsi Papua Tengah				Peningkatan <i>smart government</i>, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui: • Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan <i>output</i>: optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai <i>platform</i> terintegrasi pemerintahan di daerah • Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan ASN pada daerah otonom baru • Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN, dengan <i>output</i>: pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah • Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung <i>smart government</i>, dengan <i>output</i>: peningkatan portal pelayanan publik dan administrasi serta penerapan PTSP berbasis OSS • Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP)	

2) Arah Pembangunan Wilayah dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah
RPJMD Provinsi Papua Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih spesifik, dengan fokus untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Arah pembangunan wilayah Papua Tengah dalam RPJMD mencakup 8 Kabupaten sebagai berikut:

Gambar 3.3 Arah Pembangunan Kewilayahan Papua Tengah Pada Kabupaten Paniai 2025-2029



Sumber Data : RTRW Papua Tengah 2023- 2043**

Sasaran Pembangunan Kabupaten Paniai Pada RPJMD Provinsi Papua Tengah						
	LPE (%)	PDRB Perkapita (Rp Juta)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Pembangunan Manusia	TPT (%)
2025	3,07	23.050	35,39	0,246-0,240	59,00	1,25
2029	5,03	25.401	29	0,240-0,235	63,00	0,65

Sumber Data : Data diolah Bapperida Papua Tengah**

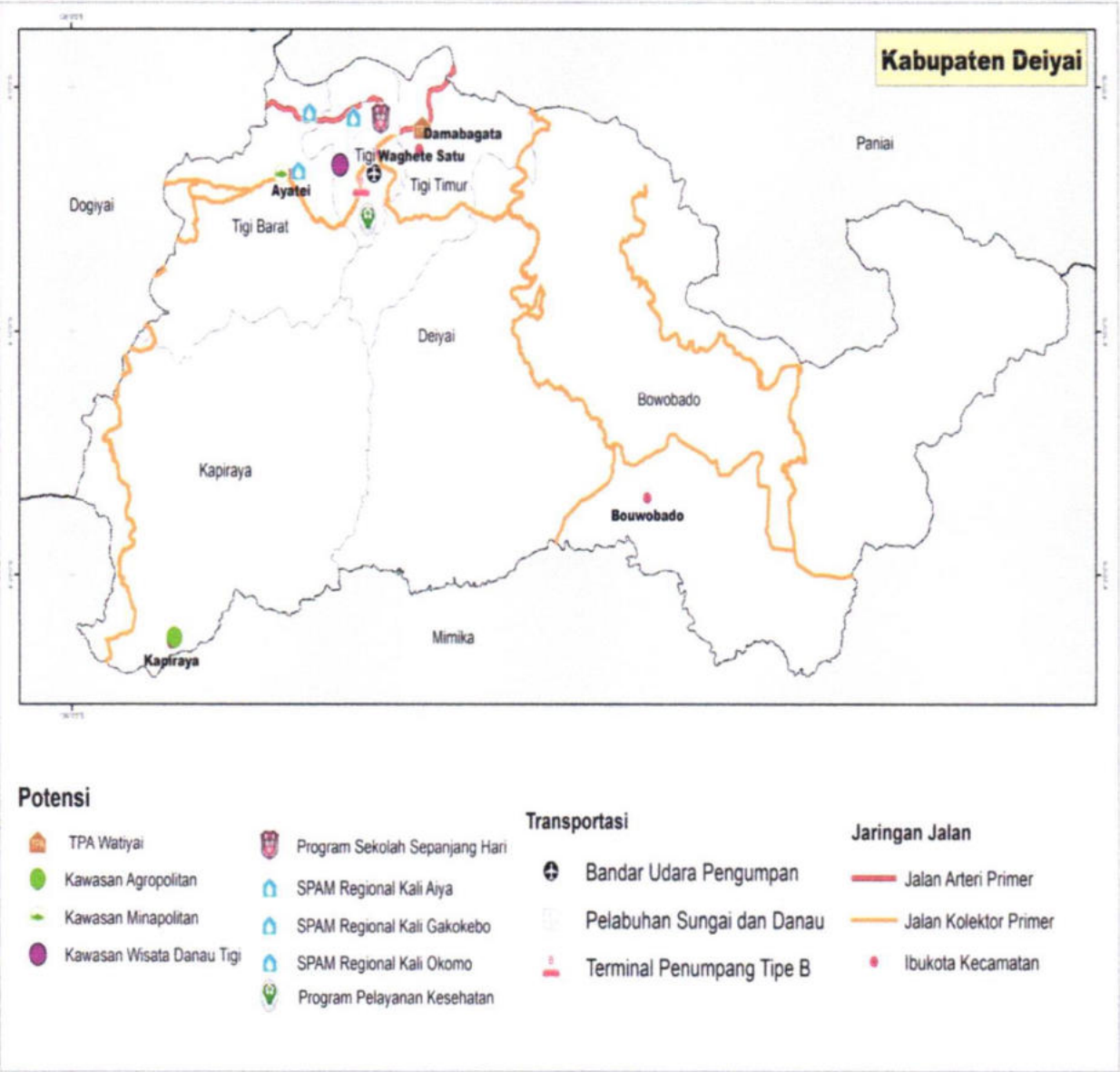
Keterangan :
LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka

Lokasi	Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan		Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui : • Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik , dengan <i>output</i>: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK serta pemberian beasiswa afirmasi menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan <i>output</i>: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan <i>output</i>: pembinaan peningkatan kesetaraan pada satuan pendidikan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan literasi, dengan <i>output</i>: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan <i>output</i>: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: • Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, dengan <i>output</i>: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i> • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan orang asli Papua, dengan <i>output</i>: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua Tengah • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular.

Lokasi Prioritas							<i>Highlight</i>	Indikasi Intervensi			
								• Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan • Penyediaan modal transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah • Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan, pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan kualitas hunian tidak layak • Eliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit frambusia, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit filariasis, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS • Peningkatan gizi, dengan <i>output</i>: : pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata laksanaanya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari <i>buffer stock</i>, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Emas (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu serta Penambahan Vitamin) • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i>			

Lokasi Prioritas							<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi				
							melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan				
Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan Pengembangan Kopi							• Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan <i>output</i> : penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB • Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi				
Kawasan Pertumbuhan : • Kawasan Pengembangan Infrastruktur							Penyiapan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Paniai, melalui: • Penyediaan sarana dan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani • Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan Tani • Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan dan pengelolaan hasil perkebunan • Perbanyak Benih bersertifikat perkebunan berbentuk Batang, Biji, dan Setek (Kopi) • Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Perkebunan Kopi				
							Pengembangan Infrastruktur pada Kabupaten Paniai melalui : • Peningkatan jalan Trans Papua-Papua Barat • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor Primer Provinsi Pada beberapa Ruas di Kabupaten Paniai • Peningkatan dan Pengembangan Bandar Udara Pengumpan • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Kabupaten Paniai • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada beberapa Lokasi (Kali Weya) • Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau • Pembangunan Terminal Type B Kabupaten Paniai • Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ipakiye Kabupaten Paniai • Pembangunan dan Peningkatan PLTD Enarotali Pada Kabupaten Paniai Kampung Aikai				

Gambar 3.4 Arah Pembangunan Kewilayahan Papua Tengah Pada Kabupaten Deiyai Tahun 2025-2029



Sumber Data : RTRW Papua Tengah 2023- 2043**

Sasaran Pembangunan Kabupaten Deiyai Pada RPJMD Provinsi Papua Tengah

	LPE (%)	PDRB Perkapita (Rp Juta)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Pembangunan Manusia	TPT (%)
2025	4,57	15.320	36,73	0,367- 0,350	52,76	1,84
2029	4,93	16.520	32,87	0,367- 0,350	55,52	1,12

Sumber Data : Data diolah Bapperida Papua Tengah**

Keterangan :

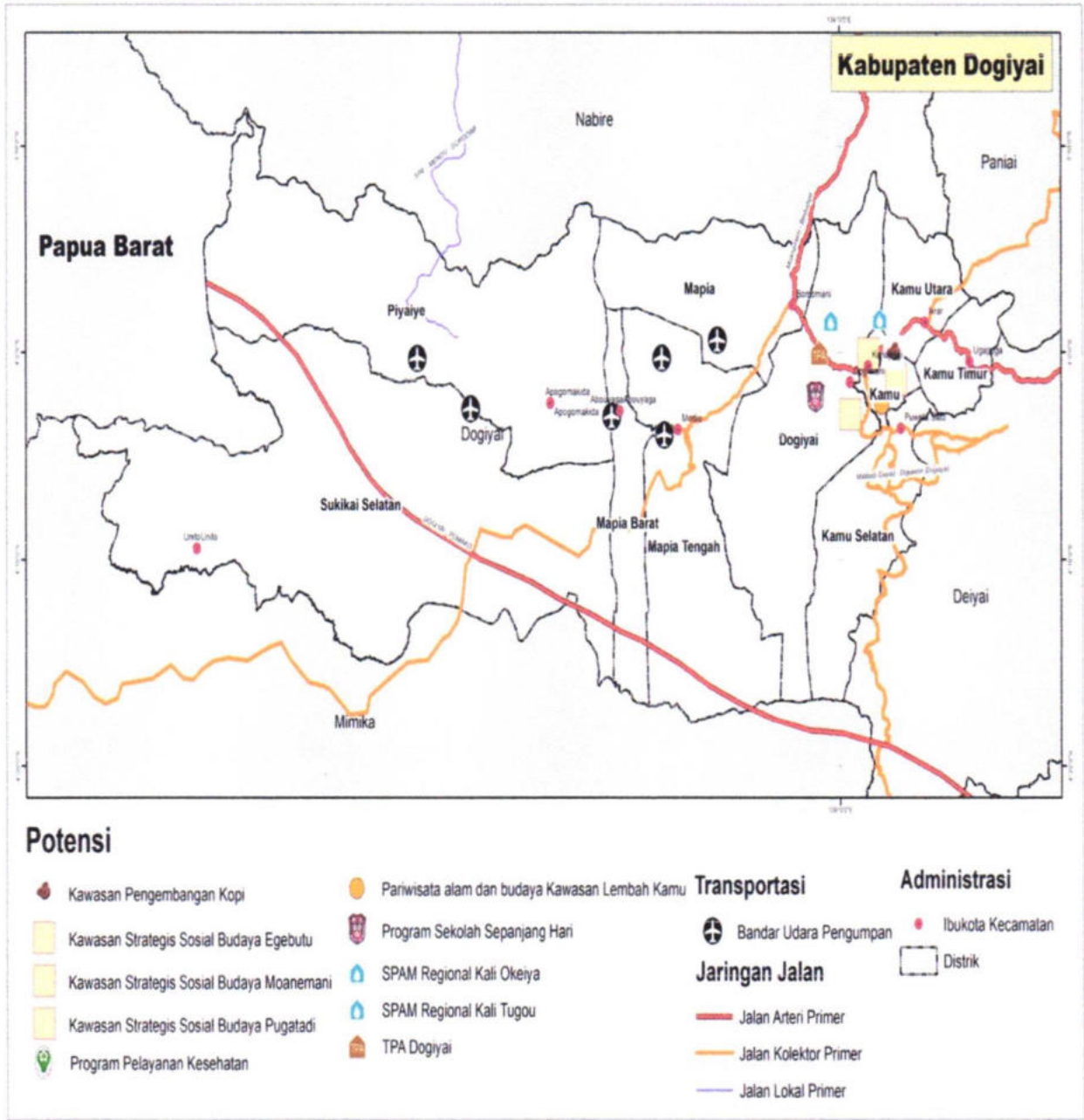
LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas				Highlight Indikasi Intervensi
				• Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan • Penyediaan modal transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah • Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan, pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan kualitas hunian tidak layak • Eliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit frambusia, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit filariasis, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS • Peningkatan gizi, dengan <i>output</i>: : pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata laksana, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari <i>buffer stock</i>, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Emak (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu serta Penambahan Vitamin) • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i>

Lokasi Prioritas							<i>Highlight</i>	Indikasi Intervensi			
								melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan			
Kawasan Pertumbuhan:	Kawasan Agropolitan Kabupaten Deiyai							Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan <i>output</i>: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB			
Kawasan Pertumbuhan:	Kawasan Minapolitan							Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi			
Kawasan Pertumbuhan:	Kawasan Agropolitan Kabupaten Deiyai							- Penyiapan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Deiyai, melalui: - Pengembangan dan Penataan Kawasan Pertanian (Padi, Jagung, Ubi, wortel) - Penyediaan sarana dan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani - Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan Tani - Penyediaan Benih Bersertifikat Pertanian (Padi, Jagung, Ubi, Wortel) - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelompok Tani Khusus OAP			
Kawasan Pertumbuhan:	Kawasan Minapolitan							- Penyiapan kawasan Minapolitan di Kabupaten Deiyai, melalui: - Peningkatan sarana usaha Perikanan Tangkap wilayah perairan darat - Pengembangan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat - Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses Pemasaran Hasil Perikanan dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam			
Kawasan Pertumbuhan:	Kawasan Pariwisata							- Penyiapan kawasan pariwisata Danau Tigi di Kabupaten Deiyai, melalui: - Penyiapan Dokumen Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Deiyai - Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan daerah - Pengembangan atraksi, dengan <i>output</i>: pendudukan <i>event</i> daerah dan pengembangan desa wisata - Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan spam dan sistem pengelolaan air limbah domestik - Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam			

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi	
Kawasan Pertumbuhan : • Kawasan Pengembangan Infrastruktur		Pengembangan Infrastruktur pada Kabupaten Deiyai melalui : • Peningkatan jalan Trans Papua-Papua Barat • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor Primer Provinsi Pada beberapa Ruas di Kabupaten Deiyai • Peningkatan dan Pengembangan Bandar Udara Waghete • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada beberapa Lokasi (Kali Aiya, Kali Gakokebo, Kali Okomo) • Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau pada Kawasan Danau Tigi • Pembangunan Terminal Type B kabupaten Deiyai • Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pada Kabupaten Deiyai	

Gambar 3.5 Arah Pembangunan Kewilayahan Papua Tengah Pada Kabupaten Dogiyai Tahun 2025-2029



Sumber Data : RTRW Papua Tengah 2023- 2043**

Sasaran Pembangunan Kabupaten Dogiyai Pada RPJMD Provinsi Papua Tengah

	LPE (%)	PDRB Perkapita (Rp Juta)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Pembangunan Manusia	TPT (%)
2025	2,02	12.294	29,62	0,381-0,306	59,00	2,39
2029	2,82	12.606	28,40	0,306-0,296	63,00	1,67

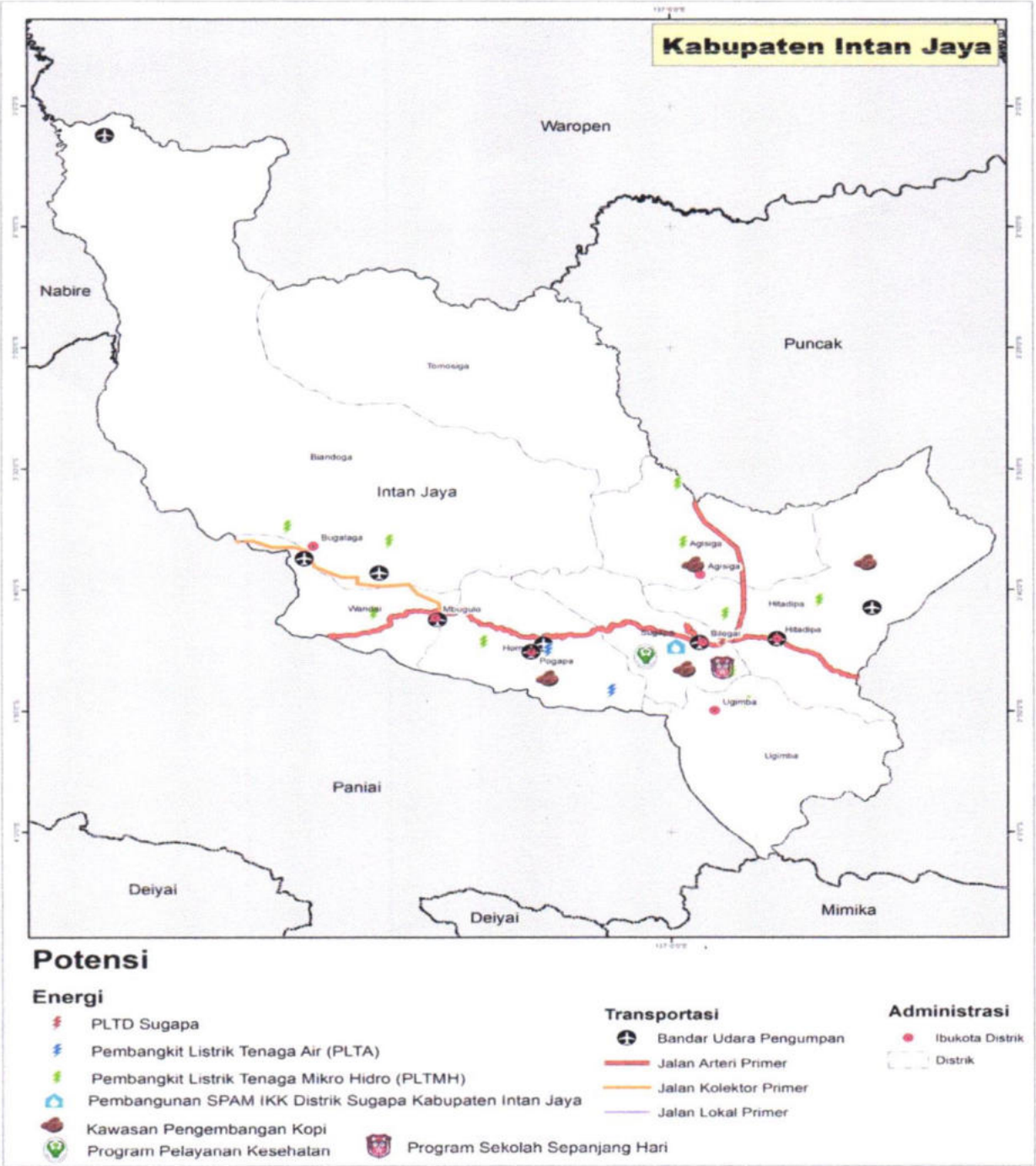
Sumber Data : Data diolah Bapperida Papua Tengah**

Keterangan :
LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas							<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi				
							• Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan • Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan <i>output</i>: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB • Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi				
Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan Pengembangan Kopi							Penyiapan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Dogiyai, melalui: • Penyediaan sarana dan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani • Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan Tani • Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan dan pengelolaan hasil perkebunan • Perbanyak Benih bersertifikat perkebunan berbentuk Batang, Biji, dan Setek (Kopi) • Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Perkebunan Kopi				
Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan Strategis Sosial Budaya Egebutu, Pugatadi, Moanemani							Penyiapan kawasan Minapolitan di Kabupaten Dogiyai, melalui: • Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek pemajuan Tradisi budaya • Pembinaan sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional • Penyediaan Sarana dan Prasaana Pembinaan Lembaga Adat • Peningkatan Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				
Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan Pariwisata							Penyiapan kawasan pariwisata di Kabupaten Dogiyai, melalui: • Penyiapan Dokumen Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Dogiyai (Lembah Kamu) • Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan daerah • Pengembangan atraksi, dengan <i>output</i>: pendudukan <i>event</i> daerah dan pengembangan desa wisata • Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan spam dan sistem pengelolaan air limbah domestik • Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam				

Lokasi Prioritas							<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi				
Kawasan Pertumbuhan : • Kawasan Pengembangan Infrastruktur							Pengembangan Infrastruktur pada Kabupaten Dogiyai melalui : • Peningkatan jalan Trans Papua-Papua Barat • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor Primer Provinsi Pada beberapa Ruas di Kabupaten Dogiyai • Peningkatan dan Pengembangan Bandar Udara Pengumpan • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada beberapa Lokasi (Kali Okeiya, Kali Tugou) • Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pada Kabupaten Dogiyai				

Gambar 3.6 Arah Pembangunan Kewilayahan Papua Tengah Pada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029



Sumber Data : RTRW Papua Tengah 2023- 2043**

Sasaran Pembangunan Kabupaten Intan Jaya Pada RPJMD Provinsi Papua Tengah

	LPE (%)	PDRB Perkapita (Rp Juta)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Pembangunan Manusia	TPT (%)
2025	1,73	10.187	41,42	0,394- 0,299	50,71	2,4
2029	3,73	12.187	38,22	0,299- 0,248	54,71	1,8

Sumber Data : Data diolah Bapperida Papua Tengah**

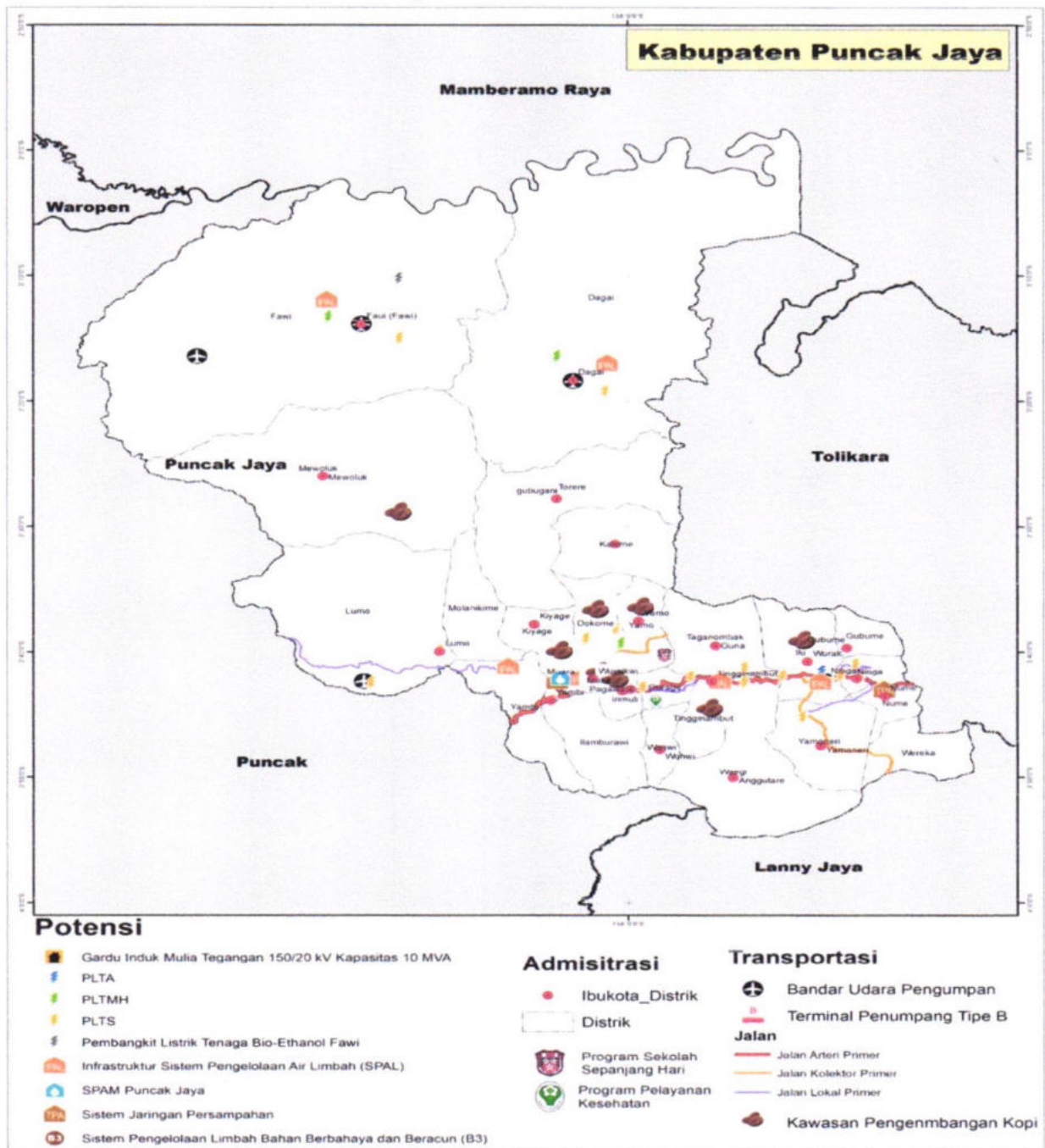
Keterangan :
LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi	Prioritas						<i>Highlight</i>	Indikasi	Intervensi		
Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan											Peningkatan akses dan mutu pelayanan - 231 - pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui : • Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik , dengan <i>output</i>: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: pemberian Program Mak Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK serta pemberian beasiswa afirmasi menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan <i>output</i>: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan <i>output</i>: pembinaan peningkatan kesetaraan pada satuan pendidikan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan literasi, dengan <i>output</i>: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan <i>output</i>: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual
											Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: • Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, dengan <i>output</i>: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i> • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan orang asli Papua, dengan <i>output</i>: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua Tengah • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular.

Lokasi	Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
			• Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan • Penyediaan modal transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah • Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan, pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan kualitas hunian tidak layak • Eliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit frambusia, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit filariasis, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS • Peningkatan gizi, dengan <i>output</i>: : pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata laksana, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari <i>buffer stock</i>, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Emas (Mak-Mak dan Anak-Anak Minum Susu serta Penambahan Vitamin) • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i>

Lokasi	Prioritas						<i>Highlight</i>	Indikasi	Intervensi		
Kawasan Pertumbuhan: Kawasan Pengembangan Infrastruktur											
Kawasan Pertumbuhan: Kawasan Pengembangan Kopi											

Gambar 3.7 Arah Pembangunan Kewilayahan Papua Tengah Pada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2025-2029



Sumber Data : RTRW Papua Tengah 2023- 2043**

Sasaran Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya Pada RPJMD Provinsi Papua Tengah

	LPE (%)	PDRB Perkapita (Rp Juta)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Pembangunan Manusia	TPT (%)
2025	5,2	11.250	35,94	0,375-0,368	52,00	0,73
2029	5,6	13.250	33,94	0,368-0,360	56,00	0,61

Sumber Data : Data diolah Bapperida Papua Tengah**

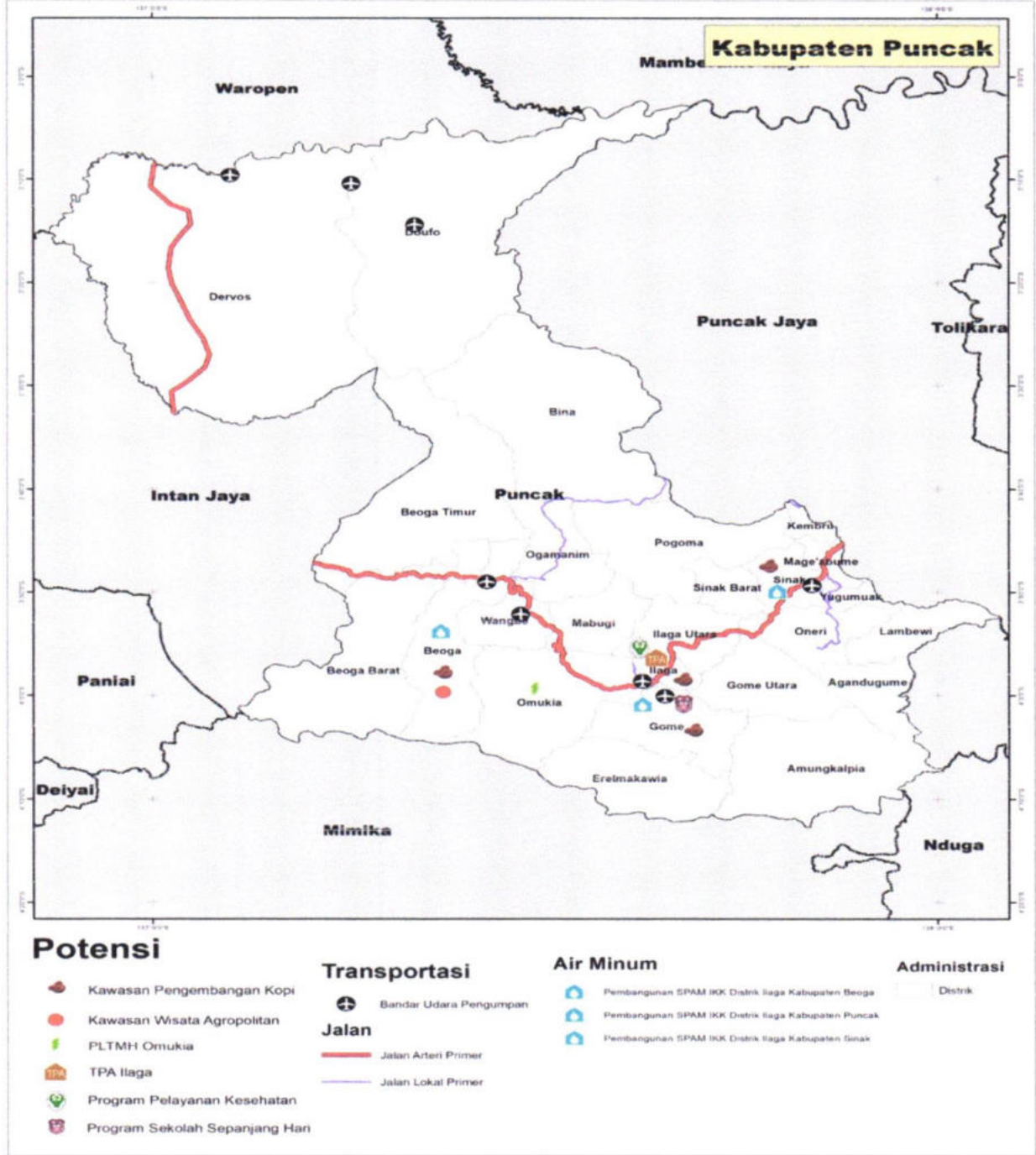
Keterangan :
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi	Prioritas						Highlight	Indikasi	Intervensi		
Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan					Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui :		• Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik , dengan <i>output</i>: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK serta pemberian beasiswa afirmasi menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan <i>output</i>: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan <i>output</i>: pembinaan peningkatan kesetaraan pada satuan pendidikan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan literasi, dengan <i>output</i>: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital		Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan <i>output</i> : penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual		
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan					Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui:		• Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, dengan <i>output</i>: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i> • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan orang asli Papua, dengan <i>output</i>: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua Tengah • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular.				

Lokasi Prioritas							Highlight	Indikasi	Intervensi		
											• Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan • Penyediaan modal transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah • Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan, pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan kualitas hunian tidak layak • Eliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit frambusia, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit filariasis, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS • Peningkatan gizi, dengan <i>output</i>: : pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata laksana, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari <i>buffer stock</i>, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Emas (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu serta Penambahan Vitamin) • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i>

Lokasi Prioritas							<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi				
							melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan • Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan <i>output</i>: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi				
Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan Pengembangan Infrastruktur							Penyiapan Kawasan Pengembangan Infrastruktur di Kabupaten Puncak Jaya, melalui: • Peningkatan jalan Trans Papua-Papua Barat • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor Primer Provinsi Pada beberapa Ruas di Kabupaten Puncak Jaya • Peningkatan dan Pengembangan Bandar Udara Pengumpan • Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B pada kabupaten Puncak Jaya • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Kabupaten Puncak Jaya • Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pada Kabupaten Puncak Jaya • Peningkatan Kapasitas Gardu Induk distrik Mulia, Serta Pembangunan PLTA, PLTMH, PLTS, Serta Pembangkit Listrik Bio-Ethanol Fawi Pada Kabupaten Puncak Jaya • Peningkatan dan Pembangunan SPAL serta pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)				

Gambar 3.8 Arah Pembangunan Kewilayahan Papua Tengah Pada Kabupaten Puncak Tahun 2025-2029



Sumber Data : RTRW Papua Tengah 2023- 2043**
Sasaran Pembangunan Kabupaten Puncak Pada RPJMD Provinsi Papua Tengah

	LPE (%)	PDRB Perkapita (Rp Juta)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Pembangunan Manusia	TPT (%)
2025	5,2	14.810	37,49	0,312-0,252	47,00	0,94
2029	5,7	16.210	34,29	0,252-0,229	51,00	0,78

Sumber Data : Data diolah Bapperida Papua Tengah**

Keterangan :
LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas							<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi				
							• Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan • Penyediaan modal transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah • Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan, pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan kualitas hunian tidak layak • Eliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit frambusia, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit filariasis, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS • Peningkatan gizi, dengan <i>output</i>: : pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata laksana, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari <i>buffer stock</i>, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Emas (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu serta Penambahan Vitamin) • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i>				

Lokasi Prioritas							<i>Highlight</i>	Indikasi Intervensi			
								melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan			
Kawasan Pertumbuhan: Kawasan Pengembangan Kopi								- Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan <i>output</i>: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB - Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi			
Kawasan Pertumbuhan : Kawasan Pengembangan Infrastruktur								Penyiapan kawasan Pengembangan Kopi di Kabupaten Puncak, melalui: - Penyediaan sarana dan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani - Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan Tani - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan dan pengelolaan hasil perkebunan - Perbanyak Benih bersertifikat perkebunan berbentuk Batang, Biji, dan Setek (Kopi) - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Perkebunan Kopi			
								Pengembangan Infrastruktur pada Kabupaten Puncak melalui : - Peningkatan jalan Trans Papua-Papua Barat - Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor Primer Provinsi Pada beberapa Ruas di Kabupaten Puncak - Peningkatan dan Pengembangan Bandar Udara Pengumpuan - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Kabupaten Puncak (Distrik Beoga, Puncak, Sinak) - Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pada Kabupaten Puncak - Pembangunan PLTMH Omukia Kabupaten Puncak			

Gambar 3.9 Arah Pembangunan Kewilayahan Papua Tengah Pada Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029



Sumber Data : RTRW Papua Tengah 2023- 2043**

Sasaran Pembangunan Kabupaten Intan Jaya Pada RPJMD Provinsi Papua Tengah

	LPE (%)	PDRB Perkapita (Rp Juta)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Pembangunan Manusia	TPT (%)
2025	4,85	446.000	13,46	0,344-0,323	77,51	6,42
2029	5,05	546.000	9,8	0,323-0,297	80,17	5,05

Sumber Data : Data diolah Bapperida Papua Tengah**

Keterangan :
LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

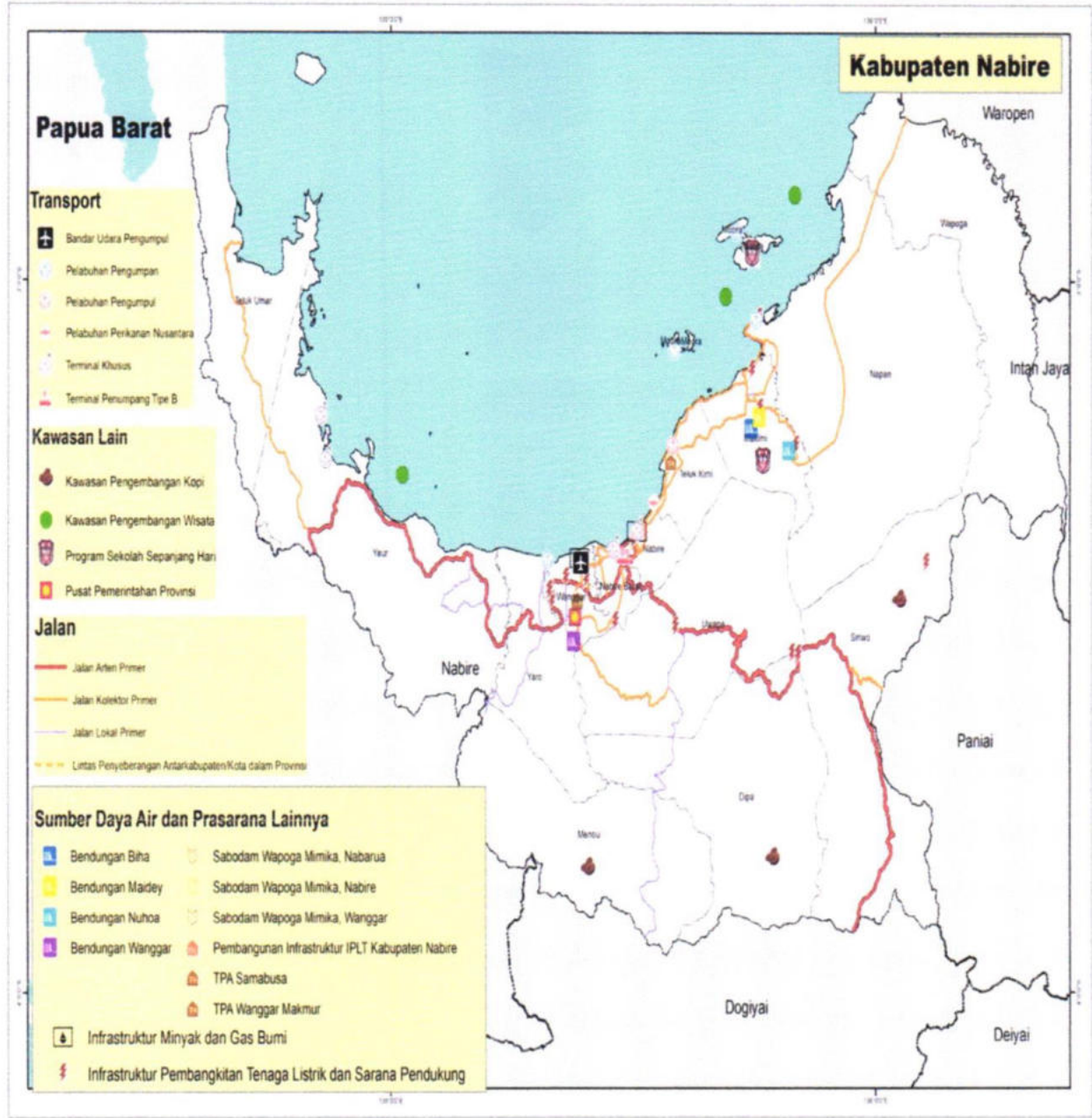
Lokasi Prioritas							<i>Highlight</i>	Indikasi Intervensi			
• Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan								Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui : • Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik , dengan <i>output</i>: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK serta pemberian beasiswa afirmasi menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan <i>output</i>: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan <i>output</i>: pembinaan peningkatan kesetaraan pada satuan pendidikan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan literasi, dengan <i>output</i>: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital • Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan <i>output</i>: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual			
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan								Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: • Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, dengan <i>output</i>: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i> • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan orang asli Papua, dengan <i>output</i>: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua Tengah • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan			

Lokasi Prioritas				Highlight Indikasi Intervensi
				poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular. • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan • Penyediaan modal transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah • Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan, pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan kualitas hunian tidak layak • Eliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit frambusia, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit filariasis, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS • Peningkatan gizi, dengan <i>output</i>: : pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata laksanaanya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari <i>buffer stock</i>, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Emas (Emak-emak dan Anak-anak Minum Susu serta Penambahan Vitamin)

Lokasi Prioritas			Highlight Indikasi Intervensi
			• Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan • Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan <i>output</i>: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB • Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi
Kawasan Pertumbuhan : • Kawasan Pengembangan Infrastruktur			Pengembangan Infrastruktur pada Kabupaten Mimika melalui : • Peningkatan jalan Trans Papua-Papua Barat • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor Primer Provinsi Pada beberapa Ruas di Kabupaten Mimika • Peningkatan dan Pengembangan Bandar Udara Pengumpuan • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Kabupaten Mimika (Distrik Mimika Timur) • Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pada Kabupaten Mimika • Pembangunan PLTD, PLTMG, PLTS pada Kabupaten Mimika
Kawasan Pertumbuhan: Kawasan Pengembangan Kopi			Penyiapan kawasan Pengembangan Kopi di Kabupaten Mimika melalui: • Penyediaan sarana dan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani • Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan Tani • Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan dan pengelolaan hasil perkebunan • Perbanyak Benih bersertifikat perkebunan berbentuk Batang, Biji, dan Setek (Kopi) • Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Perkebunan Kopi
Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan Minapolitan			Penyiapan kawasan Minapolitan di Kabupaten Mimika, melalui: • Peningkatan dan pengembangan Sumber daya alam Perikanan Laut • Peningkatan Kapasitas Eksportir Sumber Daya Alam Perikanan laut • Peningkatan sarana usaha Perikanan Tangkap wilayah perairan Laut

Lokasi Prioritas						Highlight Indikasi Intervensi			
						• Peningkatan sarana usaha Perikanan Tangkap wilayah perairan darat • Pengembangan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat • Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses Pemasaran Hasil Perikanan dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam • Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan			

Gambar 3.10 Arah Pembangunan Kewilayahan Papua Tengah Pada Kabupaten Nabire Tahun 2025-2029



Sumber Data : RTRW Papua Tengah 2023- 2043**

Sasaran Pembangunan Kabupaten Nabire Pada RPJMD Provinsi Papua Tengah

	LPE (%)	PDRB Perkapita (Rp Juta)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Pembangunan Manusia	TPT (%)
2025	3,83	12.800	24,37	0,346- 0,316	70,84	4,10
2029	4,35	16.970	23,90	0,316- 0,280	75,97	3,07

Sumber Data : Data diolah Bapperida Papua Tengah**

Keterangan :
LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi	Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
• Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan			Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui : • Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik , dengan <i>output</i>: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK serta pemberian beasiswa afirmasi menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) • Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan <i>output</i>: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA • Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan <i>output</i>: pembinaan peningkatan kesetaraan pada satuan pendidikan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan literasi, dengan <i>output</i>: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital • Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan <i>output</i>: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan			Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: • Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, dengan <i>output</i>: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i> • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan orang asli Papua, dengan <i>output</i>: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua Tengah • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan

Lokasi	Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
			primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular. • Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Papua Tengah • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan • Penyediaan modal transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah • Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan • Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan, pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan peningkatan kualitas hunian tidak layak • Eliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit frambusia, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Eliminasi penyakit filariasis, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS • Peningkatan gizi, dengan <i>output</i>: : pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata laksana, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari <i>buffer stock</i>, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan Emas (Emak-emak dan Anak-anak Minum Susu serta Penambahan Vitamin)

Lokasi Prioritas							<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi				
							• Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL • Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan • Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan <i>output</i>: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB • Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi				
Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan Pariwisata							Penyiapan kawasan pariwisata di Kabupaten Nabire, melalui: • Penyiapan Dokumen Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Nabire • Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan daerah • Pengembangan atraksi, dengan <i>output</i>: pendudukan <i>event</i> daerah dan pengembangan desa wisata • Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan spam dan sistem pengelolaan air limbah domestik • Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam				
Kawasan Pertumbuhan: Kawasan Pengembangan Kopi							Penyiapan kawasan Pengembangan Kopi di Kabupaten Nabire melalui: • Penyediaan sarana dan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani • Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan Tani • Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan dan pengelolaan hasil perkebunan • Perbanyak Benih bersertifikat perkebunan berbentuk Batang, Biji, dan Setek (Kopi) • Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Perkebunan Kopi				
Kawasan Pertumbuhan : • Kawasan Pengembangan Infrastruktur							Pengembangan Infrastruktur pada Kabupaten Nabire, melalui : • Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah • Peningkatan jalan Trans Papua-Papua Barat • Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor Primer Provinsi Pada beberapa Ruas di Kabupaten Nabire				

Lokasi Prioritas						<i>Highlight</i>	Indikasi	Intervensi			
Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan Minapolitan											

- Peningkatan dan Pengembangan Bandar Udara Pengumpan
 - Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pada Kabupaten Nabire
 - Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pada Kabupaten Nabire (TPA Samabusa dan Wanggar Makmur)
 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
 - Pembangunan dan penyediaan infrastruktur Tenaga Listrik dan Sarana pendukungnya Pada Daerah kepulauan dan Pegunungan Pada kabupaten Nabire.
- Penyiapan kawasan Minapolitan di Kabupaten Nabire, melalui:
- Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya alam Perikanan Laut
 - Peningkatan Kapasitas Eksportir Sumber Daya Alam Perikanan laut
 - Peningkatan sarana usaha Perikanan Tangkap wilayah perairan Laut
 - Peningkatan sarana usaha Perikanan Tangkap wilayah perairan darat
 - Pengembangan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
 - Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses Pemasaran Hasil Perikanan dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam
 - Peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan

3) Arah Pembangunan Wilayah dalam RAPPP (rencana aksi pembangunan provinsi Papua)

Arah pembangunan wilayah dalam Rencana Aksi Pembangunan Provinsi Papua Tengah (RAPPP) ditujukan untuk mengoptimalkan potensi lokal dengan pendekatan wilayah berbasis klaster dan pengembangan berkelanjutan. Fokus utama meliputi :

- a) Wilayah Pegunungan :
 - o Prioritas pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi udara untuk membuka bagian yang terisolir;
 - o Pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan peternakan;
 - o Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan.
- b) Wilayah Pesisir :
 - o Penguatan sektor perikanan dan kelautan;
 - o Pembangunan pelabuhan dan infrastruktur pendukung;
 - o Perlindungan lingkungan pesisir dan ekosistem laut.
- c) Wilayah Perkotaan :
 - o Pengembangan pusat ekonomi dan layanan publik;
 - o Digitalisasi layanan pemerintahan dan ekonomi kreatif;
 - o Peningkatan konektivitas transportasi darat.
- d) Wilayah Pedalaman :
 - o Pembangunan berbasis kearifan lokal;
 - o Pemanfaatan energi terbarukan;
 - o Pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan.

4) Arah Pembangunan wilayah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs)

Arah pembangunan wilayah di Provinsi Papua Tengah 2025-2029 dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs) harus disesuaikan dengan potensi daerah, tantangan, serta visi pembangunan daerah. Berdasarkan visi "Mewujudkan Papua Tengah Emas: Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan", berikut arah pembangunan wilayah yang dapat diadopsi :

a) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (SDG 8, 9, 12)

Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal :

- Pengembangan pertanian, perkebunan, dan perikanan berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan petani;
- Penguatan industri hilir berbasis sumber daya alam (kopi, kakao, hasil hutan non-kayu) untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi;
- Peningkatan akses modal dan teknologi bagi UMKM dan koperasi lokal;
- Pembangunan dan modernisasi infrastruktur ekonomi (jalan, jembatan, pasar, kawasan industri kecil).

b) Pembangunan Sosial & Pengurangan Kesenjangan (SDG 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11)
Pemerataan Akses Pelayanan Dasar :

- Peningkatan akses pendidikan berkualitas dengan pembangunan sekolah terpadu dan beasiswa afirmasi bagi anak asli Papua;
- Layanan kesehatan yang lebih merata, termasuk penguatan Puskesmas dan rumah sakit rujukan di setiap kabupaten;
- Pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan untuk meningkatkan keterlibatan dalam ekonomi dan pemerintahan;
- Pembangunan perumahan layak huni dan peningkatan akses air bersih serta sanitasi di wilayah pedalaman dan pesisir.

c) Kelestarian Lingkungan & Ketahanan Iklim (SDG 6, 7, 13, 14, 15)

Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan :

- Konservasi hutan dan keanekaragaman hayati untuk menjaga ekosistem dan mengurangi deforestasi;
- Pemanfaatan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro di daerah terpencil;
- Pengelolaan sampah dan limbah yang lebih baik, termasuk sistem daur ulang di kota-kota utama;

- Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya di daerah rawan bencana seperti pegunungan dan pesisir.
- d) Tata Kelola Pemerintahan & Kemitraan Pembangunan (SDG 16, 17)
- ➡ Reformasi Tata Kelola Berbasis Data & Digitalisasi :
- Integrasi e-Government dan e-Planning untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintahan;
 - Penguatan peran adat dan budaya dalam pembangunan, sehingga masyarakat adat dapat berpartisipasi aktif;
 - Kemitraan dengan dunia usaha, akademisi, dan organisasi internasional dalam investasi dan pembangunan wilayah;
 - Peningkatan keamanan dan stabilitas sosial melalui kebijakan inklusif yang memperkuat persatuan masyarakat.

Pembangunan di Papua Tengah 2025-2029 harus mengacu pada pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, pemerataan akses layanan dasar, kelestarian lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan pendekatan ini, Papua Tengah dapat berkembang menjadi provinsi yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip SDGs.

Keterkaitan antara RPJMN, RPJMD Provinsi Papua Tengah, RAPPP, dan SDGs

- RPJMN sebagai rencana pembangunan nasional menyediakan landasan bagi RPJMD Provinsi Papua Tengah dan RAPPP, dengan menetapkan prioritas pembangunan nasional yang juga menjadi prioritas daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
- RPJMD Provinsi Papua Tengah menurunkan arah pembangunan dari RPJMN dengan merumuskan kebijakan lebih spesifik yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal Papua Tengah. RPJMD juga menjadi acuan dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya daerah.
- RAPPP sebagai rencana aksi pembangunan Provinsi Papua untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan sekitarnya, termasuk Papua Tengah. Dokumen ini memuat : (1). Visi dan Misi Pembangunan (Arahan jangka panjang pembangunan yang ingin dicapai; (2). Program Prioritas : Sektor-sektor pembangunan utama yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi rakyat; (3). Target Pembangunan : Sasaran kuantitatif dan kualitatif yang ingin dicapai dalam periode tertentu; (4). Strategi Pelaksanaan : Langkah-langkah konkret dalam melaksanakan program pembangunan, termasuk pembagian tugas antar lembaga pemerintah daerah; (5). Indikator Kinerja : Parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan; (6). Sumber Pendanaan : Informasi mengenai pembiayaan yang dibutuhkan serta sumber-sumber pendanaan; (7). Monitoring dan Evaluasi : Mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian program;
- SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kelanjutan dari MDGs (*Millennium Development Goals*). SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tujuan SDGs meliputi berbagai aspek pembangunan yang saling terkait : (1). Tanpa Kemiskinan: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2). Tanpa Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan; (3). Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan: Menjamin kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (4). Pendidikan Berkualitas: Menjamin akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas; (5). Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan; (6). Air Bersih dan Sanitasi: Menjamin akses air bersih dan sanitasi; (7). Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin akses energi terjangkau yang berkelanjutan; (8). Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak; (9). Industri, Inovasi, dan Infrastruktur:

Membangun infrastruktur yang tangguh; (10). Mengurangi Kesenjangan: Mengurangi kesenjangan antar dan di dalam negara; (11). Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan: Mewujudkan permukiman yang layak dan inklusif; (12). Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab: Mengelola konsumsi dan produksi berkelanjutan; (13). Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil tindakan terhadap perubahan iklim; (14). Ekosistem Lautan: Melestarikan ekosistem laut; (15). Ekosistem Daratan: Melindungi ekosistem daratan; (16). Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat: Memperkuat institusi yang adil dan damai; (17). Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Memperkuat kerja sama internasional.

Secara keseluruhan, RPJMN, RPJMD Provinsi Papua Tengah, RAPPP, dan SDGs saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang di Papua Tengah, dengan mendorong perbaikan infrastruktur, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pemberdayaan masyarakat yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

2. Arah Kebijakan Pengembangan Struktur dan Pola Ruang

Arah Kebijakan Pengembangan Struktur dan Pola Ruang

yang berkaitan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Papua Tengah adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan ruang wilayah yang berkelanjutan dan efisien, guna mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan, sosial, dan ekonomi di provinsi tersebut. Berikut adalah uraian mengenai arah kebijakan pengembangan struktur dan pola ruang yang memiliki keterkaitan langsung dengan RTRW Provinsi Papua Tengah:

1) Penyusunan dan Pengelolaan Ruang Berdasarkan Potensi Lokal

- Keterkaitan dengan RTRW: Dalam RTRW Provinsi Papua Tengah, pengembangan struktur dan pola ruang harus mencerminkan potensi daerah yang ada, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, serta sumber daya alam lainnya. Pengelolaan ruang harus mempertimbangkan daya dukung dan kapasitas lingkungan agar pembangunan dapat berlangsung berkelanjutan.
- Arah Kebijakan: Kebijakan pengembangan ruang harus mendorong pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Misalnya, pengembangan kawasan industri berbasis pertanian dan pariwisata, serta pengembangan kawasan konservasi untuk menjaga kelestarian alam.

2) Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah

- Keterkaitan dengan RTRW: RTRW Provinsi Papua Tengah memberikan arah bagi pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah, terutama infrastruktur jalan, transportasi, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang terhubung akan mempercepat mobilitas barang dan orang, mendukung distribusi hasil pertanian, serta mempermudah akses ke layanan dasar.
- Arah Kebijakan: Pengembangan infrastruktur harus fokus pada pembangunan transportasi yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi utama, serta pengembangan jaringan telekomunikasi yang memperluas akses informasi dan teknologi untuk masyarakat.

3) Penyusunan Pola Ruang yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

- Keterkaitan dengan RTRW: RTRW Provinsi Papua Tengah harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan ruang. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan minimalkan dampak negatif terhadap ekosistem, seperti kawasan hutan, taman nasional, dan kawasan lindung lainnya.
- Arah Kebijakan: Kebijakan pengembangan ruang harus mengarahkan pemanfaatan lahan untuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan peruntukan ruang yang jelas untuk konservasi, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pengurangan dampak perubahan iklim.

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengelolaan Ruang untuk Peningkatan Kesejahteraan

- Keterkaitan dengan RTRW: Pembangunan ruang yang diarahkan dalam RTRW Provinsi Papua Tengah harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan SDM, antara lain, pembangunan kawasan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan fasilitas kesehatan yang terjangkau serta mudah diakses oleh masyarakat.
 - Arah Kebijakan: Kebijakan pengembangan ruang harus menciptakan ruang untuk pengembangan sektor pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kualitas SDM, serta fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 5) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Ruang
- Keterkaitan dengan RTRW: Tata kelola ruang dalam RTRW harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Kebijakan ini mengarah pada terciptanya ruang yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan tetapi juga mengutamakan kepentingan masyarakat.
 - Arah Kebijakan: Kebijakan tata ruang harus memperkuat sistem perencanaan dan pengawasan pembangunan, yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam menentukan peruntukan dan pemanfaatan ruang yang optimal.
- 6) Pemanfaatan Potensi Kawasan Pariwisata
- Keterkaitan dengan RTRW: Dalam RTRW Provinsi Papua Tengah, kawasan pariwisata yang berpotensi harus dipetakan dengan jelas untuk mengarahkan pembangunan yang ramah lingkungan dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.
 - Arah Kebijakan: Kebijakan pengembangan ruang harus mendorong pembangunan pariwisata yang mengedepankan keberlanjutan, termasuk pengelolaan kawasan wisata alam dan budaya, serta peningkatan fasilitas pariwisata yang dapat meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan.
- 7) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Secara Bijaksana
- Keterkaitan dengan RTRW: RTRW Provinsi Papua Tengah akan mencakup zonasi ruang yang jelas, dengan peruntukan ruang untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk sektor pertambangan, kehutanan, dan perikanan.
 - Arah Kebijakan: Pengelolaan ruang harus mengatur penggunaan lahan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, serta melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil alam secara bijaksana.
- 8) Perwujudan Kota dan Kampung yang Berkelanjutan
- Keterkaitan dengan RTRW: RTRW Provinsi Papua Tengah harus mencakup perencanaan ruang untuk pembangunan kota dan kampung yang berkelanjutan. Hal ini mencakup penataan ruang perkotaan, penyediaan ruang terbuka hijau, serta pengembangan kawasan kampung yang mendukung pertanian dan kehidupan sosial masyarakat.
 - Arah Kebijakan: Kebijakan pengembangan ruang harus mendorong perencanaan kota dan kampung yang ramah lingkungan, dengan fokus pada kualitas hidup yang tinggi bagi masyarakat, serta mendorong investasi di sektor infrastruktur dan fasilitas umum.
- 9) Pembangunan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal
- Keterkaitan dengan RTRW: Pengembangan pola ruang yang mempertimbangkan kearifan lokal dalam RTRW akan mendukung pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, seperti pertanian berbasis Agroekologi, serta pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata.
 - Arah Kebijakan: Kebijakan pengembangan ruang harus memperkuat sektor ekonomi lokal yang berbasis pada kearifan lokal dan mendukung penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, serta meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan.
- Secara keseluruhan, Arah Kebijakan Pengembangan Struktur dan Pola Ruang di Provinsi Papua Tengah akan mengarah pada pembangunan yang terencana, efisien, ramah lingkungan, dan memperhatikan potensi lokal.

Kebijakan ini harus bersinergi dengan RTRW Provinsi Papua Tengah agar pembangunan dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan.

3.6 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan daerah adalah Program Unggulan dan Prioritas Kepala Daerah yang merupakan serangkaian inisiatif strategis yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan daerah. Program ini berfokus pada isu-isu utama yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan wilayah. Program unggulan mencerminkan komitmen kepala daerah dalam mengatasi permasalahan utama di daerah serta memanfaatkan potensi lokal secara optimal, sementara program prioritas menentukan fokus pembangunan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan urgensi, kebutuhan masyarakat, dan ketersediaan sumber daya.

Dokumen ini menjadi dasar kebijakan strategis dalam mewujudkan Papua Tengah Emas: Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan dalam periode 2025-2029.

Kesimpulan: Program-program prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 harus dilaksanakan dengan melibatkan berbagai OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat Papua Tengah, mulai dari peningkatan infrastruktur, kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga pengelolaan sumber daya alam dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Untuk melakukan harmonisasi program unggulan dan prioritas Gubernur/Wakil Gubernur dengan program pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kita perlu memastikan bahwa program-program yang ditetapkan sejalan dengan prinsip dan pedoman dalam peraturan tersebut, serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah yang terpilih.

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan harmonisasi program unggulan dan prioritas dengan RPJMD Provinsi Papua Tengah :

- 1) Identifikasi Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Daerah
Visi Gubernur/Wakil Gubernur: "Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan"
Visi RPJMD Provinsi Papua Tengah: Memastikan visi gubernur/wakil gubernur tercermin dalam RPJMD yang mencakup program-program jangka menengah.
- 2) Penyesuaian dengan Kategori Program Pembangunan Daerah
Program pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur Permendagri umumnya dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:
 - Program Prioritas Pembangunan: Program yang bersifat strategis dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun;
 - Program Pembangunan Umum: Program yang bersifat operasional dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan;
 - Kegiatan Penunjang: Kegiatan yang bersifat teknis dan administratif yang mendukung pelaksanaan program prioritas.
- 3) Penyelarasan RPJMD dengan RPJPD dan RPJMN
Untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi, RPJMD Provinsi Papua Tengah harus diselaraskan dengan RPJPD 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Penyelarasan ini bertujuan agar kebijakan dan program pembangunan daerah selaras dengan arah kebijakan nasional serta visi jangka panjang pembangunan daerah. Berikut langkah-langkah penyelarasan yang dilakukan :
 - a) Identifikasi Keselarasan Visi dan Misi
 - Memastikan bahwa visi dan misi pembangunan Papua Tengah sejalan dengan visi RPJPD dan RPJMN.
 - Menyesuaikan tujuan strategis daerah dengan agenda pembangunan nasional.

- b) Sinkronisasi Program dan Sasaran Strategis
 - Mengharmonisasikan program prioritas daerah dengan program prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029.
 - Menyesuaikan indikator kinerja utama daerah dengan target pembangunan nasional.
 - c) Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lain
 - Mengadakan pertemuan dan konsultasi dengan kementerian terkait untuk memastikan kebijakan daerah sesuai dengan peraturan pusat.
 - Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam perumusan kebijakan pembangunan yang saling mendukung.
 - d) Integrasi dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
 - Memastikan bahwa program pembangunan daerah mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).
 - Menyusun kebijakan berbasis keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
 - e) Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Terintegrasi
 - Menyusun dokumen RPJMD yang mencerminkan sinergi antara rencana jangka menengah daerah, jangka panjang daerah, dan nasional.
 - Memastikan bahwa alokasi anggaran dan sumber daya mendukung implementasi program yang telah diselaraskan.
 - f) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
 - Mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan implementasi RPJMD berjalan sesuai dengan target RPJPD dan RPJMN.
 - Melakukan penyesuaian kebijakan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
- 4) Kategorisasi Program Unggulan dan Prioritas Gubernur/Wakil Gubernur
- Berdasarkan visi dan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan, program unggulan dan prioritas dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori dalam RPJMD :
- a) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas
 - Pembangunan jalan dan jembatan.
 - Pengembangan transportasi udara, laut, dan darat.
 - Penguatan jaringan komunikasi dan digitalisasi.
 - b) Ketahanan Pangan dan Pengembangan Ekonomi Lokal
 - Penguatan sektor pertanian dan perkebunan unggulan.
 - Pengembangan UMKM dan industri hilir.
 - Optimalisasi tata niaga dan ekspor komoditas lokal.
 - c) Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas
 - Penguatan sekolah satu atap dan peningkatan kapasitas guru.
 - Peningkatan layanan kesehatan untuk ibu, anak, dan lansia.
 - Pembangunan fasilitas kesehatan berbasis komunitas.
 - d) Penguatan SDM dan Ketenagakerjaan
 - Program pelatihan vokasi dan sertifikasi tenaga kerja.
 - Pemberdayaan OAP dalam pemerintahan dan sektor ekonomi.
 - e) Stabilitas Sosial dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
 - Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - Peningkatan kapasitas lembaga adat dan organisasi keagamaan.
 - Pembangunan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
- 5) Penyusunan Rencana Kerja OPD Berdasarkan Program Prioritas
- Setiap OPD yang terlibat dalam pelaksanaan program prioritas harus merumuskan rencana kerja yang jelas dan terukur, serta melibatkan indikator kinerja yang relevan untuk memastikan bahwa program tersebut dapat tercapai sesuai dengan RPJMD.

- 6) Koordinasi Antar OPD
Mengadakan pertemuan lintas OPD untuk menyamakan persepsi dan tanggung jawab masing-masing sektor dalam implementasi program prioritas.
- 7) Penguatan Indikator Kinerja
Menyusun indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) yang dapat diukur secara jelas untuk mengevaluasi keberhasilan program.
- 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis
Menyusun Renstra OPD berdasarkan program unggulan yang telah diselaraskan dengan RPJMD.
- 9) Penganggaran yang Efektif dan Efisien
Memastikan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas pembangunan daerah.
- 10) Evaluasi dan Pengawasan Program
Untuk memastikan bahwa program-program unggulan dan prioritas berjalan sesuai dengan rencana, perlu dilakukan evaluasi berkala dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaannya. Evaluasi ini dilakukan agar program-program tersebut dapat disesuaikan dengan dinamika yang terjadi di lapangan.
Dengan harmonisasi antara program unggulan dan prioritas Gubernur/Wakil Gubernur dengan program pembangunan daerah, baik dalam RPJMD, OPD, maupun nomenklatur yang ditetapkan oleh Permendagri, diharapkan pembangunan Provinsi Papua Tengah dapat berjalan dengan efisien dan terarah, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.7 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah mencakup berbagai inisiatif yang dirancang untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan RPJMD. Program ini terdiri dari berbagai sektor yang melibatkan OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun beberapa program utama yang akan dijalankan meliputi:

- Peningkatan Konektivitas Wilayah: Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, transportasi darat, laut, dan udara guna meningkatkan aksesibilitas antarwilayah;
- Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal: Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan: Pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan serta layanan kesehatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Program perlindungan lingkungan, konservasi hutan, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan: Reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif.

Untuk memastikan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029, serta merujuk pada strategi dan arah kebijakan yang telah dijelaskan, maka program-program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah (OPD) perlu dijabarkan pada setiap misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Berikut adalah gambaran umum dari struktur yang biasanya terdapat dalam Tabel 6 dalam dokumen RPJMD, yang menjabarkan program-program OPD berdasarkan misi pembangunan. Tabel ini bertujuan untuk memberikan pemetaan yang jelas mengenai pelaksanaan program dan kegiatan setiap OPD, serta menghubungkannya dengan sasaran yang ingin dicapai.

Tabel 3. 5 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja		Awal Perencanaan RPJMD 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2025		2026		2027		2028		2029		2030/2022/2030			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
VISI : MEWUJUDKAN PAPUA TENGAH EMAS, ADIL, BERDAYA SAING, BERMARTABAT, HARMONIS, MAJU, DAN BERKELANJUTAN																							
Misi 1 : Mengembangkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan, pelatihan, dan inisiatif kesehatan yang inovatif, sehingga terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan berdaya saing.																							
Program Prioritas : Menjamin layanan pendidikan dan kesehatan bermutu dimulai dari kampung. Meneruskan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan keberadaan guru yang bermutu di pedalaman, menciptakan sekolah satu atap berasrama di setiap kabupaten, mendirikan <i>center of excellence</i> sebagai sarana pelatihan guru, riset dan teknologi, serta unit layanan disabilitas. Memperbanyak sarana kesehatan yang berfungsi sebagai pusat <i>on the job training</i> , utamanya untuk mengoptimalkan layanan terpadu balita sakit dan lansia.																							
Tujuan: Mewujudkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan yang berpotensi dan kompeten																							
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia dini 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	Persen (%)	N/A	65%	538.099.949.371	68%	532.45669.323	72%	558.272.836.255	76%	673.368.619.881	80%	740.128.981.869	84%	812.970.380.000	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen (%)	N/A	65%	538.099.949.371	68%	532.45669.323	72%	558.272.836.255	76%	673.368.619.881	80%	740.128.981.869	84%	812.970.380.000	Urusan Pendidikan						
3.	PROGRAM PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru Persentase Guru Yang memiliki Sertifikat Pendidikan	Persen (%)	N/A	65%	15.037.062.800	68%	19.740.769.080	72%	1.714.845.988	76%	23.886.330.587	80%	26.274.963.646	85%	28.902.460.009	Urusan Pendidikan						
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/di Perbaharui	Persen (%)	N/A	65%	733.278.600	68%	1.266.606.460	72%	1.415.267.106	76%	1.556.793.817	80%	1.712.473.198	85%	1.883.720.518	Urusan Pendidikan						
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Rasio siswa menengah dapat berbahasa inggris	Persen (%)	N/A	65%	-	0%	2.180.000.000	70%	605.000.000	74%	2.295.500.000	78%	732.050.000	80%	2.435.255.000	Urusan Pendidikan						

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja		Awal Perencanaan RPJMD 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang Urusan/Unsur		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								2025		2026		2027		2028		2029						2030-2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					Target	Rp
6.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI), Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada balita	Persen (%)	N/A	380	643,870,504,630	375	813,817,555,093	370	719,149,310,602	365	663,014,241,662	360	570,965,665,828	360	3,410,917,277,814	Urusan Kesehatan	DINKES P2KB					
		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen (%)	N/A	11,9	643,970,504,630	10,9	813,817,555,093	9,9	719,149,130,602	8,9	663,014,241,662	7,9	570,965,665,828	7,9	3,410,917,277,814	Urusan Kesehatan						
7.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen (%)	N/A	2	103,728,954,600	3	104,101,850,060	4	104,512,035,066	5	104,963,238,573	6	105,459,562,430	6	522,765,640,729	Urusan Kesehatan						
		Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen (%)	N/A	80	900,000,000	82	1,000,000,000	85	1,100,000,000	87	1,110,000,000	90	1,111,000,000	90	5,221,000,000	Urusan Kesehatan						
8.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan	Persen (%)	N/A	5	9,440,338,700	6	10,294,372,570	7	11,113,809,827	8	12,105,190,810	9	13,075,709,891	9	56,029,421,798	Urusan Kesehatan						
9.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pelayan Kesehatan Yang Terakreditasi	Persen (%)	N/A	48	371,600,000	55	408,760,000	60	449,636,000	65	494,599,600	70	544,059,200	70	2,268.654,800	Urusan Kesehatan						

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Awal Perencanaan RPJMD 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
10	PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persen (%)	30	48	371,600,000	55	408,760,000	60	449,636,000	65	494,599,600	70	544,059,200	70	2,268.654,800	Urusan Kesehatan	
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja sosial/Tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan Pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	Persen (%)	N/A	50%	3.000.000.000	55%	3.300.000.000	57%	3.630.000.000	64%	3.993.000.000	67%	4.392.300.000	70%	4.831.530.000	Urusan Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
12	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan yang tertangani	Persen (%)	N/A	50%	3.800.000.000	56%	4.180.000.000	58%	4.598.000.000	65%	5.057.800.000	69%	5.563.580.000	70%	6.119.938.000	Urusan Sosial	
13	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen (%)	N/A	51%	2.790.000.000	57%	3.069.000.000	59%	3.375.900.000	67%	3.713.490.000	69%	4.084.839.000	72%	4.493.322.900	Urusan Sosial	
14	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penyandang Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen (%)	N/A	52%	12.278.333.000	58%	13.506.166.300	60%	14.856.782.930	65%	16.342.461.223	68%	17.976.707.345	71%	19.774.378.079	Urusan Sosial	
15	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana alam, sosial, dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen (%)	N/A	52%	5.000.000.000	55%	5.500.000.000	60%	6.050.000.000	65%	6.655.000.000	68%	7.320.500.000	71%	8.052.550.000	Urusan Sosial	

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja		Awal Perencanaan RPJMD 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang Urusan/Unsur		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									2025		2026		2027		2028		2029						20302022030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					Target	Rp
			pada saat dan setelah tanggap darurat bencana																					
16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persen (%))	6 Dokumen	10%	500.000.000	15%	1.000.000.000	20%	1.100.000.000	25%	1.100.000.000	30%	1.200.000.000	35%	1.500.000.000	Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak						
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2	2	1.500.000.000	2,1	2.000.000.000	2,2	2.500.000.000	2,3	2.500.000.000	2,4	2.500.00.000	2,5	2.500.000.000	Urusan Statistik	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					
18	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen (%)	N/A	90%	914.742.500	95%	960.479.625	95%	1.008.503.606	95%	1.058.928.787	95%	1.111.875.226	95%	1.167.468.987	Penelitian dan Pengembangan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI					
19	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persen (%)	N/A	10%	500.000.000	11%	500.000.000	12%	500.000.000	13%	500.000.000	14%	500.000.000	14%	500.000.000	Penelitian dan Pengembangan						

Misi 2 : Mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dengan memperkuat kapasitas produksi lokal, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan memfasilitasi akses pasar yang lebih luas yang bertujuan untuk menciptakan swasembada pangan, lapangan kerja, menghapus kemiskinan ekstrim,

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Awal Perencanaan RPJMD 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030-2030				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah demi terwujudnya kemandirian ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, adil dan merata																		
Program Prioritas : Menjaga stabilitas harga pangan serta intensifikasi hasil pertanian lokal untuk menembus pasar ekspor. Stabilitas harga pangan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, intensifikasi hasil, membangun pasar induk di setiap kabupaten serta mengoptimalkan tata niaga produk pangan. Mengoptimalkan hasil pertanian unggulan lokal seperti kopi, wortel, nenas dan lainnya, untuk menembus pasar ekspor, terutama ke negara-negara Pasifik.																		
Tujuan : Meningkatkan potensi sumber daya alam dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan																		
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen (%)	N/A	10%	4.800.000.000	20%	5.200.000.000	30%	5.600.000.000	40%	6.000.000.000	50%	6.400.000.000	10%	4.800.000.000	Urusan Pangan	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	N/A	10%	9.120.000.000	20%	9.880.000.000	30%	10.640.000.000	40%	11.400.000.000	50%	12.160.000.000	10%	9.120.000.000	Urusan Pangan	
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen (%)	N/A	10%	1.560.000.000	20%	1.690.000.000	30%	1.820.000.000	40%	1.950.000.000	50%	2.080.000.000	10%	1.560.000.000	Urusan Pangan	
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Prasyarat dan Mutu Keamanan Pangan	Persen (%)	N/A	10%	2.160.000.000	20%	2.340.000.000	30%	2.520.000.000	40%	2.700.000.000	50%	2.880.000.000	10%	2.160.000.000	Urusan Pangan	
5	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA	Persentase jumlah kampung dengan sumber daya aparatur kampung yang unggul dan kompeten untuk	Persen (%)	N/A	5%	1.911.969.000	10%	2.007.567.450	15%	2.107.945.822	20%	2.213.343.114	25%	2.324.010.269	30%	2.440.210.783	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja		Awal Perencanaan RPJMD 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang Urusan/Unsur		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									2025		2026		2027		2028		2029					2030-2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
		meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan kampung yang memadai																	N SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG				
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	Persen (%)	5	10	16.939.626.966	20	18.351.265.547	30	19.762.898.127	40	21.174.533.708	50	22.586.169.288	60	16.939.626.966	Urusan Kelautan dan Perikanan	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN					
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen (%)	N/A	10%	51.678.000.000	20%	55.984.500.000	30%	60.291.000.000	40%	64.597.500.000	50%	68.904.000.000	10%	51.678.000.000	Urusan Pertanian						
Program Prioritas : Membangun industri hulu dan hilir yang saling menopang meningkatkan nilai tambah dan daya saing Papua Tengah																							
T4 : Meningkatkan potensi sumber daya manusia dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan																							
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen (%)	N/A	50%	1,356,680,000	55%	1,500,000,000	60%	1,500,000,000	65%	1,650,000,000	70%	1,850,000,000	80%	1,990,000,000	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen (%)	N/A	50%	800,000,000	55%	850,000,000	60%	875,000,000	65%	900,000,000	70%	1,000,000,000	80%	1,500,000,000	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN					
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN	Persentase Koperasi Aktif	Persen (%)	N/A	50%	724,320,000	55%	750,320,000	60%	775,320,000	65%	800,000,000	70%	850,000,000	80%	1,500,000,000	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan						

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja		Awal Perencanaan RPJMD 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								2025		2026		2027		2028		2029		2030					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	KSP/USP KOPERASI																	Menengah					
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen (%)	N/A	50%	793,413,000	55%	800,413,000	60%	825,413,000	65%	850,413,000	70%	900,000,000	80%	1,500,000,000	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen (%)	N/A	50%	4,200,000,000	55%	4,500,000,000	60%	4,750,000,000	65%	5,000,000,000	70%	5,150,000,000	80%	1,500,000,000	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHAKECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi ke formal	Persen (%)	N/A	50%	5,418,803,000	55%	5,418,803,000	60%	5,718,803,000	65%	6,000,000,000	70%	6,150,000,000	80%	6,555,000,000	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persen (%)	N/A	50%	2,800,000,000	55%	2,900,000,000	60%	3,000,000,000	65%	3,100,000,000	70%	3,200,000,000	80%	3,400,000,000	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Persentase Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen (%)	N/A	50%	1,356,680,000	55%	1,500,000,000	60%	1,500,000,000	65%	1,650,000,000	70%	1,850,000,000	80%	1,990,000,000							
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Persen (%)	N/A	80%	842.828.800	80%	389.774.000	85%	1.271.580.200	85%	471.626.540	90%	518.789.194	100%	570.668.113							

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja	Awal Perencanaan RPJMD 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					2031	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	Persen (%)	N/A	-	0	-	-	80%	349.869.200	80%	384.856.120	85%	423.341.732	90%	465.675.905	Urusan Penanaman Modal	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA TENGAH					
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen (%)	N/A	80%	1.214.384.600	80%	1.335.823.060	85%	1.469.405.366	85%	1.616.345.903	90%	1.777.980.493	90%	1.955.778.542	Urusan Penanaman Modal						
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persen (%)	N/A	80%	1.301.467.800	80%	1.431.614.580	85%	1.574.776.038	85%	1.732.253.642	90%	1.905.479.006	90%	2.096.026.907	Urusan Penanaman Modal						
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan informasi Penanaman Modal	Persen (%)	N/A	-	0	80%	160.269.450	80%	176.296.395	85%	193.926.035	85%	213.318.638	90%	234.650.502	Urusan Penanaman Modal						
	PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	Persentase kerja sama penanaman modal yang di tindaklanjuti	Persen (%)	N/A	-	0	-	0	-	0	80%	349.869.200	80%	384.856.120	90%	423.341.732	Urusan Penanaman Modal						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen (%)	N/A	10%	51.678.000.000	20%	55.984.500.000	30%	60.291.000.000	40%	64.597.500.000	50%	68.904.000.000	10%	51.678.000.000	Urusan Pertanian	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen (%)	N/A	10%	2.628.132.300	20%	2.847.143.325	30%	3.066.154.350	40%	3.285.163.375	50%	3.504.176.400	10%	2.628.132.300	Urusan Pertanian						

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Awal Perencanaan RPJMD 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen (%)	N/A	10%	1.920.000.000	20%	2.080.000.000	30%	2.240.000.000	40%	2.400.000.000	50%	2.560.000.000	10%	1.920.000.000	Urusan Pertanian	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	Persen (%)	N/A	10%	1.920.000.000	20%	2.080.000.000	30%	2.240.000.000	40%	2.400.000.000	50%	2.560.000.000	10%	1.920.000.000	Urusan Pertanian	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi	Persen (%)	N/A	10%	4.200.000.000	20%	4.550.000.000	30%	4.900.000.000	40%	5.250.000.000	50%	5.600.000.000	10%	4.200.000.000	Urusan Pertanian	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan Yang difasilitasi	Persen (%)	N/A	50%	4,135,147,600	55%	4,500,000,600	60%	4,750,000,600	65%	4,900,000,000	70%	5,000,000,000	85%	5,500,000,000	Urusan Perdagangan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana Perdagangan Yang ditingkatkan Kualitasnya	Persen (%)	N/A	0	0	50%	15,750,000,000	55%	20,000,000,000	60%	20,500,000,000	65%	21,000,000,000	85%	21,200,000,000	Urusan Perdagangan	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen (%)	N/A	50%	25,268,927,500	55%	25,500,000,000	60%	25,750,000,000	65%	26,000,000,000	70%	26,500,000,000	80%	26,700,000,000	Urusan Perdagangan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	Persen (%)	N/A	0	0	50%	750,000,000	55%	780,000,000	60%	1,000,000,000	65%	1,100,000,000	85%	2,800,000,000	Urusan Perdagangan	
	PROGRAM STANDAR DISASIDAN	Persentase Penanganan Pengaduan	Persen (%)	N/A	0	0	50%	750,000,000	55%	780,000,000	60%	1,000,000,000	65%	1,100,000,000	80%	1,800,000,000	Urusan Perdagangan	

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Awal Perencanaan RPJMD 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		20302022030			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PERLINDUNGAN KONSUMEN	Konsumen																
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan barang produk dalam negeri	Persen (%)	N/A	0	0	50%	500,000,000	55%	780,000,000	60%	1,000,000,000	65%	1,100,000,000	75%	2,800,000,000	Urusan Perdagangan	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen (%)	50%	50%	20,632,098,111	55%	20,750,000,000	60%	21,000,000,000	65%	21,250,000,000	70%	21,500,000,000	80%	21,800,000,000	Urusan Perindustrian	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	Persen (%)	50%	50%	0		600,000,000	55%	750,000,000	60%	1,000,000,000	65%	1,150,000,000	75%	2,000,000,000	Urusan Perindustrian	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persen (%)	50%	50%	1,600,000,000	55%	1,750,000,000	60%	2,000,000,000	65%	2,250,000,000	70%	2,500,000,000	80%	2,900,000,000	Urusan Perindustrian	
M3: Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dengan mengimplementasikan sistem administrasi publik yang berbasis digitalisasi teknologi, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan semangat kerja sama dan komitmen terhadap pelayanan dan pembangunan melalui ekosistem organisasi kerja yang adaptif dan agile yang mendukung kultur budaya kompetitif demi terwujudnya transformasi tata kelola yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat																		
Program Prioritas: Membangun iklim sosial dan politik yang damai dengan melibatkan Majelis Rakyat Papua Tengah, Dewan Agama dan perwakilan rakyat Papua Tengah																		
Tujuan : Mewujudkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dengan mengimplementasikan sistim administrasi publik berbasis digitalisasi teknologi																		
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan	%	100	100	4.000.000.000	100	4.200.000.000	100	4.410.000.000	100	4.630.500.000	100	4.862.025.000	100	5.105.126.250	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	Persen (%)	N/A	100%	14,422,041,000.00	100%	15.864,245.	100%	17.450.66	100%	19.195.73	100%	21,115,31	100%	21,115,31	Kesatuan Bangsa dan Politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja	Awal Perencanaan RPJMD 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						2025		2026		2027		2028		2029		2030					2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
	KARAKTER KEBANGSAAN	Kebangsaan							100,00		9,610,00		6,571,000		0,228,10		0,228,10		POLITIK			
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik Kader Partai Politik	Persen (%)	N/A	100%	7,465,944,000,00	100%	8,212,538,400,00	100%	9,033,792,240,00	100%	9,937,171,464,00	100%	10,930,888,610,40	100%	10,930,888,610,40	Kesatuan Bangsa dan Politik					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen (%)	N/A	100%	16,489,537,000,00	100%	18,138,490,700,00	100%	19,952,339,770,00	100%	21,947,573,747,00	100%	24,142,331,121,70	100%	24,142,331,121,70	Kesatuan Bangsa dan Politik					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang	Persen (%)	N/A	100%	5,853,931,000,00	100%	6,439,324,100,00	100%	7,083,256,510,00	100%	7,791,582,161,00	100%	8,570,740,377,10	100%	8,570,740,377,10	Kesatuan Bangsa dan Politik					

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja		Awal Perencanaan RPJMD 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
									2025		2026		2027		2028		2029		2030						2022		2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					Target	Rp	Target	Rp
			dilaksanakan																									
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persen (%)	N/A	100%	70,416,366,893,00	100%	77,458,003,582,30	100%	85,203,803,940,53	100%	93,724,184,334,58	100%	103,096,602,768,04	100%	103,096,602,768,04	100%	103,096,602,768,04	Kesatuan Bangsa dan Politik									
	PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA	Persentase Program Penunjang Lembaga MRP	Persen (%)	100%	100%	265.858.040.000	100%	292.443.800.000	100%	321.688.180.000	100%	353.824.610.500	100%	389.242.697.800	100%	1.310.971.715.800	100%	1.310.971.715.800	Kekhususan Papua	MAJELIS RAKYAT PAPUA								
Misi 4 : Menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, damai, dan tertib, di mana setiap warga masyarakat dapat hidup dan berkembang dengan optimal dengan semangat gotong royong dan kerja sama antar unsur masyarakat untuk mewujudkan stabilitas daerah yang berkeadilan melalui pendekatan adat, budaya, sosial dan ekonomi																												
Program Prioritas : Menciptakan stabilitas keamanan dan keharmonisan antar suku, budaya dan kelompok masyarakat yang beragam, melalui kerja sama yang erat antara tokoh agama, adat dan pelaku pembangunan lainnya lewat forum komunikasi antar umat, melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan sosial rutin yang mempromosikan perdamaian dan harmonisasi.																												
Tujuan : Memantapkan lingkungan yang aman, tenteram, damai dan tertib																												
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan petugas satuan polisi pamong praja	Persen (%)	N/A	30%	3.094.000	35%	3.043.400	40%	3.743.740	45%	4.118.114	50%	4.529.925	60%	4.982.918	Urutan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	DINAS PEMADAM KEBAKARAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI										

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja		Awal Perencanaan RPJMD 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
									2025		2026		2027		2028		2029		2030					2022		2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	Target	Rp
																		kat	PAMONG PRAJA								
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Ratio Mitigasi dan pengurangan Bencana	Persen (%))	N/A	50%	3.100.000	55%	3.410.000	60%	3.751.000	65%	4.126.11000	70%	4.538.719	80%	4.992.581	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen (%))	N/A	50%	3.120.000	55%	3.432.000	60%	3.775.200	65%	4.152.720	70%	4.567.992	80%	5.024.791	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan	%	100	100	4.000.000.000	100	4.200.000.000	100	4.410.000.000	100	4.630.500.000	100	4.862.025.000	100	5.105.126.250	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH									
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen (%)	N/A	100%	14,422,041,000,00	100%	15,864,245,100,00	100%	17,450,669,610,00	100%	19,195,736,571,000	100%	21,115,310,228,10	100%	21,115,310,228,10	Kesatuan Bangsa dan Politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI	Persen (%)	N/A	100%	7,465,9	100%	8,212,5	100%	9,033,7	100%	9,937	100%	10,930,888,61		10,930,	Persen (%)	Kesatuan Bangsa dan										

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja		Awal Perencanaan RPJMD 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang Urusan/Unsur		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									2025		2026		2027		2028		2029						20302022030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					Target	Rp
	POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				44,000,00		38,400,00		92,240,00		,171,464,00		0,40	100%	888,610,40		Politik							
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Persen (%)	N/A	100%	5,853,931,000,00	100%	6,439,324,100,00	100%	7,083,256,510,00	100%	7,791,582,161,00	100%	8,570,740,377,10	100%	8,570,740,377,10	Kesatuan Bangsa dan Politik							
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persen (%)	N/A	100%	70,416,366,893,00	100%	77,458,003,582,30	100%	85,203,803,940,53	100%	93,724,184,334,58	100%	103,096,602,768,04	100%	103,096,602,768,04	Kesatuan Bangsa dan Politik							
	PROGRAM	Persentase		100	100	38.123.01	100	39.660.000.	100	43.626.00	100	47.989.00	100	52.787.00	100	58.066.00	Kekhusu	MAJELIS						

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Awal Perencanaan RPJMD 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030-2022-2030			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen (%)			1.611		000		0.000		0.000		0.000		0.000	san Papua	RAKYAT PAPUA
Misi 5 : Melestarikan kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan ekologi melalui praktik-praktik pembangunan yang ramah lingkungan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Papua Tengah, sekarang dan di masa yang akan datang																		
Program Prioritas : Meningkatkan integrasi kearifan lokal dan pengetahuan adat dalam perencanaan dan eksekusi kegiatan pertambangan dan kegiatan ekstraktif lainnya dengan membentuk pembangunan yang lebih harmonis dengan lingkungan. Mengembangkan model mata pencaharian yang berkelanjutan untuk masyarakat adat, seperti yang dilakukan oleh program pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan pemberdayaan. Memastikan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pertambangan. Mendorong penerapan teknologi dan metode pertambangan dan kegiatan ekstraktif yang minim dampak lingkungan, serta melakukan upaya mitigasi dan restorasi pasca-tambang. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan menjaga kelestarian alam yang berkelanjutan.																		
Tujuan : Meningkatkan kelestarian kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan																		
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen (%)	20	20	1.796.488.000	22	700.000.000	23	770.000.000	24	847.000.000	25	931.700.000	25	931.700.000	Urusan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PARTANAHAN
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Angka Indeks	57.88	57.89	1.063.776.000.000	57.90	1.170.135.600	57.91	1.287.168.960	57.92	1.415.885.865	57.93	1.557.474.451	57.93	1.557.474.451	Urusan Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	Persen (%)	0	0	0	10	2.000.000.000	11	2.20.000.000	12	2.420.000.000	13	2.662.000.000	13	2.662.000.000	Urusan Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase limbah B3 yang dikelola	Persen (%)	0	0	0	10	1.000.000.000	11	1.100.000.000	12	1.210.000.000	13	1.331.000.000.000	13	1.331.000.000.000	Urusan Lingkungan	

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja		Awal Perencanaan RPJMD 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2025		2026		2027		2028		2029				20302022030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3																	an Hidup			
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang di tingkatkan Kapasitasnya	Persen (%)	0	0	0	2	500.000.000	3	500.000.000	4	605.000.000	5	665.500.000	5	665.500.000		Urusan Lingkungan Hidup			
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan lingkungan Hidup yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen (%)	0	0	0	10	1.250.000.000	15	1.375.500.000	20	1.512.500.000	25	1.663.750.000	25	1.663.750.000		Urusan Lingkungan Hidup			
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen (%)	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	2	1.210.000.000	2	1.331.000.000	2	1.331.000.000		Urusan Lingkungan Hidup			
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus	Persen (%)	0	0	0	5	500.000.000	6	550.000.000	7	605.000.000	8	665.500.000	8	665.500.000		Urusan Lingkungan Hidup			

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja		Awal Perencanaan RPJMD 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									2025		2026		2027		2028		2029		2030					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	LINGKUNGAN HIDUP	Tindak Pidana Lingkungan Hidup																						
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	0	30	30.000.000.000	32	33.000.000.000	35	36.300.000.000	40	43.923.000.000	45	43.923.000.000	45	43.923.000.000	Urusan Lingkungan Hidup							
	PROGRAM KESEHJATERAAN RAKYAT	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	30.407.320.900	100	31.927.686.945	100	33.524.071.292	100	35.200.274.857	100	36.960.288.600	100	38.808.303.030	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Luas WPR diusulkan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	N/A	5%	1.020.552.000	10%	1.051.168.560	15%	1.082.703.616	20%	1.115.184.725	25%	1.148.640.267	30%	1.183.099.475	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
		Jumlah rekomendasi terhadap usulan IPR	Persen (%)	N/A	5%	1.020.552.000	10%	1.051.168.560	15%	1.082.703.616	20%	1.115.184.725,30	25%	1.148.640.267	30%	1.183.099.475,03								
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah Rumah Tangga penerima listrik yang bersumber dari pembangkit EBT	Persen (%)	N/A	5%	0	10%	440.000.000	15%	484.000.000	20%	532.400.000	25%	585.640.000	30%	644.204.000								
		Porsi EBT dalam Bauran Energi	Persen (%)	N/A	5%	0	10%	440.000.000	15%	484.000.000	20%	532.400.000	25%	585.640.000	30%	644.204.000								
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	Persen (%)	20	25%	50.000.000.000,00	30%	51.500.000.000,00	35%	53.045.000.000	40%	54.636.350.000	45%	56.275.440.500	50%	57.963.703.715	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral							
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen (%)	N/A	100	15.000.000.000	100	16.500.000.000	100	18.150.000.000	100	19.965.000.000	100	21.961.500.000	100	15.000.000.000	Urusan Pariwisata	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN						

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Awal Perencanaan RPJMD 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen (%)	N/A	4	5.000.000.000	4	6.050.000.000	4	6.655.000.000	4	7.320.000.000	4	8.052.000.000	4	5.000.000.000	Urusan Pariwisata	PARIWISATA
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana Perdagangan Yang ditingkatkan Kualitasnya	Persen (%)	N/A	0	0	50%	15,750,000,000	55%	20,000,000,000	60%	20,500,000,000	65%	21,000,000,000	85%	21,200,000,000	Urusan Perdagangan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Orang Asli Papua (OAP)	%	70	90	2.999.999.900	100	3.149.999.895	100	3.307.499.890	100	3.472.874.885	100	3.646.518.629	100	3.828.844.561	Sekretaris Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
Program Prioritas : Mengoptimalkan peran Masyarakat Papua Tengah (OAP) yang berkeadilan untuk berpartisipasi dalam birokrasi pemerintahan dan ekonomi melalui pengembangan balai latihan dan vokasi untuk mengembangkan sumber daya siap berwirasusaha dan siap kerja.																		
Tujuan : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan																		
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen (%)	N/A	0	0	15	181.500.000	20	199.650.000	25	219.615.000	30	1.127.357.000	35	1.240.092.700	Urusan Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen (%)	5	10	7.000.000.000	15	7.210.000.000	20	7.426.300.000	25	7.649.089.000	30	7.878.561.670	35	8.114.918.520	Urusan Tenaga Kerja	

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Awal Perencanaan RPJMD 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		20302022030			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Persen (%)	5	10	6.785.215.000,00	15	6.988.771.450,00	20	7.198.434.593	25	7.414.387.631	30	7.636.819.260	35	7.865.923.838	Urusan Tenaga Kerja	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak pekerja dan Dialog Sosial	Persen (%)	5	10	5.183.197.000	15	5.338.692.910	20	5.498.853.697	25	5.663.819.308	30	5.833.733.887	35	6.008.745.904	Urusan Tenaga Kerja	
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-hak Dasarnya	Persen (%)	N/A	0	0	5	770.000.000	10	847.000.000	15	931.700.000	20	1.024.870.000	25	1.127.357.000	Urusan Tenaga Kerja	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen (%)	N/A	50%	1,356,680,000	55%	1,500,000,000	60%	1,500,000,000	65%	1,650,000,000	70%	1,850,000,000	80%	1,990,000,000	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen (%)	N/A	50%	800,000,000	55%	850,000,000	60%	875,000,000	65%	900,000,000	70%	1,000,000,000	80%	1,500,000,000	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Persen (%)	N/A	50%	724,320,000	55%	750,320,000	60%	775,320,000	65%	800,000,000	70%	850,000,000	80%	1,500,000,000	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja		Awal Perencanaan RPJMD 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									2025		2026		2027		2028		2029		2030					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen (%)	N/A	50%	793,413,000	55%	800,413,000	60%	825,413,000	65%	850,413,000	70%	900,000,000	80%	1,500,000,000	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen (%)	N/A	50%	4,200,000,000	55%	4,500,000,000	60%	4,750,000,000	65%	5,000,000,000	70%	5,150,000,000	80%	1,500,000,000	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi ke formal	Persen (%)	N/A	50%	5,418,803,000	55%	5,418,803,000	60%	5,718,803,000	65%	6,000,000,000	70%	6,150,000,000	80%	6,555,000,000	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persen (%)	N/A	50%	2,800,000,000	55%	2,900,000,000	60%	3,000,000,000	65%	3,100,000,000	70%	3,200,000,000	80%	3,400,000,000	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
	PROGRAM PENGEMBANGAN BADAN HUKUM	Persentase Koperasi yang memiliki Izin	Persen (%)	N/A	50%	1,356,680,000	55%	1,500,000,000	60%	1,500,000,000	65%	1,650,000,000	70%	1,850,000,000	80%	1,990,000,000	Urusan Koperasi, Usaha							

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja		Awal Perencanaan RPJMD 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									2025		2026		2027		2028		2029		2030					2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
KOPERASI			Usaha Simpan Pinjam															Kecil, dan Menengah							
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			Persentase ASN Yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, Manajerial dan fungsional	Persen (%)	50	50	23,994,071,914.00	52	22,494,480,914,00	55	22,494,480,914,00	57	4,494,480,914,00	60	22,494,480,914,00	50	23,994,071,914.00	Pendidikan dan Pelatihan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
			Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen (%)	100%	100%	1,000,000,000,00	100%	1,000,000,000,00	100%	1,000,000,000,00	100%	1,000,000,000,00	100%	1,000,000,000,00	100%	1,000,000,000,00	Pendidikan dan Pelatihan							
			Persentase ASN Yang didapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen (%)	15%	15%	1,000,000,000,00	20%	1,000,000,000,00	25%	1,000,000,000,00	30%	1,000,000,000,00	35%	1,000,000,000,00	15%	1,000,000,000,00	Pendidikan dan Pelatihan							
			Persentase Realisasi Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	Persen (%)	100%	100%	1,000,000,000,00	100%	1,000,000,000,00	100%	1,000,000,000,00	100%	1,000,000,000,00	100%	1,000,000,000,00	100%	1,000,000,000,00	Pendidikan dan Pelatihan							
Misi 6: Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata, sehingga tercipta konektivitas antar masyarakat dan antar wilayah dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan, memperkuat integrasi antar wilayah, dan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi terhadap kemajuan Papua Tengah																									
Program Prioritas : Membangun konektivitas antar wilayah dengan membangun sarana komunikasi dan akses jalur darat menuju daerah-daerah terisolir utamanya jalur distribusi pangan lokal dengan menggandeng komunitas adat dan pemerintahan nasional. Subsidi tiket pesawat untuk guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pedalaman, dengan menggandeng pemangku kepentingan lainnya																									
Tujuan : Tercapainya peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata																									
PORGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Tingkat kemantapan Jalan	Persen (%)	17,5	20	262.212.445.906	23	270.078.819.283	26	278.181.183.861	29	286.526.619.377	32	295.122.417.958	35	303.976.090.497	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT						

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja	Awal Perencanaan RPJMD 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2025		2026		2027		2028		2029					2030	2022	2030
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	Target
																		Ruang				
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen (%)	2	2	30.000.000.000	2,1	55.000.000.000	2,2	55.000.000.000	2,3	55.000.000.000	2,4	55.000.000.000	2,5	55.000.000.000		Urusan Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIKA DAN PERSANDIAAN			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen (%)	9	9	317.780.764.863	9	317.780.764.863	12	327.780.764.863	12	327.780.764.863	15	357.780.764.863	15	357.780.764.863	Keuangan		BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen (%)	24,95	24,95	1.013.027.047.363	24,95	1.013.027.047.363	24,95	1.013.027.047.363	24,95	1.013.027.047.363	24,95	1.013.027.047.363	24,95	1.013.027.047.363						
	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	Persentase cakupan infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik	Persen (%)	27,6	30	53.594.786.000	33	55.202.629.580,00	36	56.858.708.467	39	58.564.469.721	42	60.321.403.813	45	62.131.045.927	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
Misi 7 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan sehingga terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian alam Papua Tengah untuk generasi yang akan datang																						
Program Prioritas : Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur publik yang mendukung percepatan pembangunan baik sektor darat, laut dan udara																						
Tujuan : Tercapainya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir																						
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan	Persen (%)	N/A	5%	4.566.263.950	10%	4.703.251.868	15%	4.844.349.424	20%	4.989.679.907	25%	5.139.370.304	30%	5.293.551.413	Urusan Pekerjaan Umum dan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN				

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja		Awal Perencanaan RPJMD 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
									2025		2026		2027		2028		2029		2030						2022		2030	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					Target	Rp	Target	Rp
		Pemukiman Rawan Banjir																Penataan Ruang	N RAKYAT									
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	Persen (%)	N/A	5%	4.566.263.950	10%	4.703.251.868	15%	4.844.349.424	20%	4.989.679.907	25%	5.139.370.304	30%	5.293.551.413	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomunikasi	Persen (%)	N/A	5%	4.566.263.950	10%	4.703.251.868	15%	4.844.349.424	20%	4.989.679.907	25%	5.139.370.304	30%	5.293.551.413	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah Lintas kabupaten kota	Persen (%)	20	25	22.973.000.500	30	23.662.190.515	35	24.372.056.230	40	25.103.217.917	45	25.856.314.454	50	26.632.003.888	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	Persen (%)	N/A	0	500.0000.000	5	515.000.000	10	530.450.000	15	546.363.500	20	562.754.405	25	579.637.037	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan	Persen (%)	41.44	44	1.993.750.000	47	2.053.562.500	51	2.115.169.375	53	2.178.624.456	56	2.243.983.189	59	2.311.302.685	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan											

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja	Awal Perencanaan RPJMD 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				2022		2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
	LIMBAH	akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)																	Ruang					
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Persen (%)	5%	7%	6.889.071.655	9%	7.095.743.804	11%	7.308.616.118	13%	7.527.874.602	15%	7.753.710.840	17%	7.986.322.165		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan Gedung dalam kondisi baik	Persen (%)	N/A	0	132.600.000	4,5	136.578.000,00	18,18	140.675.340	20	144.895.600	25	149.242.468	30	153.719.742		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Persen (%)	N/A	45	23.951.405.000	55	26.346.545.500	65	28.981.200.050	75	34.777.440.060	100	45.210.672.078	100	45.210.672.078		Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN					
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	Persen (%)	20	25	19.105.948.000	30	22.927.137.600	35	27.512.565.120	40%	33.015.078.144	45	39.618.093.772	45	39.618.093.772		Urusan Perhubungan						
	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Pengendalian KKOP	Persen (%)	N/A	45	98.936.693.000	55	100.000.000.000	65	120.500.000.000	75	140.150.000.000	85	165.965.000.000	20	165.965.000.000		Urusan Perhubungan						
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Cakupan Perlintasan Kereta Api di tangani	Persen (%)	N/A	0	0	5	2.500.000.000	10	2.750.000.000	15	3.025.000.000	20	3.630.000.000	20	3.630.000.000		Urusan Perhubungan						
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	Persentase pengembangan daya saing keolahragaan (satuan, persen)	Persen (%)	N/A	12,05	20.000.000.000	18,53	22.000.000.000	25,03	24,200.000.000	31,53	26,620.000.000	38,03	29.282.000.000	44,53	40.786.000		Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DINAS KEPEMUDAN, OLAHRAGA DAN					

Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan Indikator Kinerja		Awal Perencanaan RPJMD 2024		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang Urusan/Unsur	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2025		2026		2027		2028		2029				20302022030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
																		PARIWISATA			

ata : Data Diolah, 202

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA-PD (Rencana Strategi Perangkat Daerah) beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatifnya.

4.1 Program Perangkat Daerah

Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Melalui penyajian program dan anggaran indikatif yang disusun berdasarkan aspek-aspek pembangunan dan urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam RPJMD guna untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusannya.

Rincian rencana program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut ini

Tabel 4. 1 Prioritas yang disertai Kebutuhan Indikasi Rencana Program Pendanaan
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029

NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun awal)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tersedianya Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persen (%)	100 %	100 %	24.676.580.960	100 %	27.760.000.000	100 %	27.930.000.000	100 %	27.435.000.000	100 %	29.090.000.000	100 %	29.445.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia dini 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	Persen (%)	N/A	65%	538.099.949.371	68%	532.45669.323	72%	558.272.836.255	76%	673.368.619.881	80%	740.128.981.869	84%	812.970.380.000	
	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	Persen (%)	N/A	65%	538.099.949.371	68%	532.45669.323	72%	558.272.836.255	76%	673.368.619.881	80%	740.128.981.869	84%	812.970.380.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangk an Kurikulum Muatan Lokal	Persen (%)	N/A	65%	538.099.949.371	68%	532.45669.323	72%	558.272.836.255	76%	673.368.619.881	80%	740.128.981.869	84%	812.970.380.000	
PROGRAM PENDIDIK DAN	Indeks Pemerataan Guru	Indeks	N/A	65%	15.037.062.800	68%	19.740.769.080	72%	1.714.845.988	76%	23.886.330.587	80%	26.274.963.646	85%	28.902.460.009	

TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidikan		N/A	65%	15.037.062.800	68%	19.740.769.080	72%	1.714.845.988	76%	23.886.330.587	80%	26.274.963.646	85%	28.902.460.009	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia dini 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	Persen (%)	N/A	65%	538.099.949.371	68%	532.45669.323	72%	558.272.836.255	76%	673.368.619.881	80%	740.128.981.869	84%	812.970.380.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Rasio siswa menengah dapat berbahasa inggris	Rasio	N/A	65%	-	0%	2.180.000.000	70%	605.000.000	74%	2.295.500.000	78%	732.050.000	80%	2.435.255.000	
KESEHATAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	20.712.014.890	100%	21.333.375.337	100%	21.973.376.597	100%	22.632.577.895	100%	23.311.555.232	100%	24.010.901.888	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jiwa	380	380	179.024.685.622	375	184.395.426.191	370	189.927.288.976	365	195.625.107.646	360	201.493.860.875	360	207.538.676.701	
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	Persen (%)	11,9	11,9	539.231.000	10,9	555.407.930	9,9	572.070.168	8,9	589.232.273	7,9	606.909.241	7,9	625.116.518	DINKES P2KB
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen (%)	2	2	6.474.110.400	3	6.668.333.712	4	6.868.383.723	5	7.074.435.235	6	7.286.668.292	6	7.505.268.341	
	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen (%)	80	80	3.232.329.100	82	3.329.298.973	85	3.429.177.942	87	3.532.052.280	90	3.638.014.879	90	3.747.155.325	

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan	Persen (%)	5	5	0	6	1.000.000.000	7	1.030.000.000	8	1.060.900.000	9	1.092.727.000	9	1.125.508.810	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	Persen (%)	48	48	25.633.574.800	55	26.402.582.044	60	27.194.659.505	65	28.010.499.290	70	28.850.814.269	70	29.716.338.697	
PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persen (%)	30	48	0	55	1.000.000.000	60	1.030.000.000	65	1.060.900.000	70	1.092.727.000	70	1.125.508.810	
PUPR																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100	100	496.758.370.122	100	511.661.121.225	100	527.010.954.862	100	542.821.283.508	100	559.105.922.013	100	575.879.099.673	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan Pemukiman Rawan Banjir	Persen (%)	N/A	5%	4.566.263.950	10%	4.703.251.868	15%	4.844.349.424	20%	4.989.679.907	25%	5.139.370.304	30%	5.293.551.413	
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	Persen (%)	N/A	5%	4.566.263.950	10%	4.703.251.868	15%	4.844.349.424	20%	4.989.679.907	25%	5.139.370.304	30%	5.293.551.413	
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomunikasi	Persen (%)	N/A	5%	4.566.263.950	10%	4.703.251.868	15%	4.844.349.424	20%	4.989.679.907	25%	5.139.370.304	30%	5.293.551.413	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah Lintas kabupaten kota	Persen (%)	20	25	22.973.000.500	30	23.662.190.515	35	24.372.056.230	40	25.103.217.917	45	25.856.314.454	50	26.632.003.888	

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	Persen (%)	N/A	0	500.0000.000	5	515.000.000	10	530.450.000	15	546.363.500	20	562.754.405	25	579.637.037	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase peningkatan rumah t5angga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Persen (%)	41.44	44	1.993.750.000	47	2.053.562.500	51	2.115.169.375	53	2.178.624.456	56	2.243.983.139	59	2.311.302.685	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Persen (%)	5%	7%	6.889.071.655	9%	7.095.743.804	11%	7.308.616.118	13%	7.527.874.602	15%	7.753.710.840	17%	7.986.322.165	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik	Persen (%)	27,6	30	53.594.786.000	33	55.202.629.580,00	36	56.858.708.467	39	58.564.469.721	42	60.321.403.813	45	62.131.045.927	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan Gedung dalam kondisi baik	Persen (%)	N/A	0	132.600.000	4,5	136.578.000,00	18,18	140.675.340	20	144.895.600	25	149.242.468	30	153.719.742	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Persen (%)	N/A	0	0	4,5	136.578.000,00	18,18	140.675.340	20	144.895.600	25	149.242.468	30	153.719.742	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan Jalan	Persen (%)	17,5	20	262.212.445.906	23	270.078.819.283	26	278.181.183.861	29	286.526.619.377	32	295.122.417.958	35	303.976.090.497	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi Ahli	Persen (%)	N/A	2	529.532.277,	4	545.418.245	6	561.780.792	8	578.634.216	10	595.993.242	12	613.873.040	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan	Persen (%)	N/A	2,5	2.876.344.223	4	2.962.634.549	6	3.051.513.586	8	3.143.058.993	10	3.237.350.763	12	3.334.471.286	

	ruang di daerah provinsi															
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN																
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban berencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen (%)	10,8	12	0	14	10.000.000.000	16	11.000.000.000	18	12.100.000.000	20	13.310.000.000	22	14.641.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas Kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani	Persen (%)	N/A	0	0	10	6.000.000.000	15	6.600.000.000	20	7.260.000.000	25	7.986.000.000	30	8.784.600.000	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Pemukiman yang sudah dilengkapi PSU(Prasarana, sarana dan Fasilitas Umum)	Persen (%)	N/A	0	0	5	5.000.000.000	10	5.500.000.000	15	6.050.000.000	20	6.655.000.000	25	7.320.500.000	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan	Persen (%)	N/A	0	0	5	1.000.000.000	10	1.100.000.000	15	1.210.000.000	20	1.331.000.000	25	1.464.100.000	
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persen (%)	N/A	100%	14,000,389,915	100%	14,420,401,612	100%	14,853,013,661	100%	15,298,604,071	100%	15,757,562,193	100%	16,230,289,059	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPOL PP
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan petugas satuan polisi pamong praja	Persen (%)	N/A	30%	13,470,031,600	35%	13,874,132,548	40%	14,290,356,524	45%	14,719,067,220	50%	15,160,639,237	60%	15,615,458,414	

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Ratio Mitigasi dan pengurangan Bencana	Persen (%)	N/A	50%	1,408,103,675	55%	1,450,346,785	60%	1,493,857,18 9	65%	1,538,672,9 04	70%	1,584,833,0 92	80%	1,632,378,0 84	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen (%)	N/A	50%	1,233,463,000	55%	1,270,466,890	60%	1,308,580,89 7	65%	1,347,838,3 24	70%	1,388,273,4 73	80%	1,429,921,6 78	
SOSIAL																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.00 0	100%	1.500.000.0 00	100%	1.500.000.0 00	100%	1.500.000.0 00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja sosial/Tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan Pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	Persen (%)	N/A	50	14.078.333.000	55	14.500.682.990	57	14.935.703.4 80	64	15.383.774. 584	67	15.845.287. 822	70	16.320.646. 456	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan yang tertangani	Persen (%)	N/A	50%	3.800.000.000	56%	4.180.000.000	58%	4.598.000.00 0	65%	5.057.800.0 00	69%	5.563.580.0 00	70%	6.119.938.0 00	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen (%)	N/A	51	6.200.000.000	57	6.386.000.000	59	6.577.580.00 0	67	6.774.907.4 00	69	6.978.154.6 22	72	7.187.499.2 61	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penyandang Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen (%)	N/A	52	21.278.333.000	58	21.916.682.990	60	22.574.183.4 80	65	23.251.408. 984	68	23.948.951. 254	71	24.667.419. 791	

PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana alam, sosial, dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen (%)	N/A	52%	5.000.000.000	55%	5.500.000.000	60%	6.050.000.000	65%	6.655.000.000	68%	7.320.500.000	71%	8.052.550.000	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan nasional yang dikelola dengan baik	Persen (%)	N/A	52%	3.400.000.000	55%	3.800.000.000	60%	4.000.000.000	65%	4.200.000.000	68%	4.600.000.000	70%	4.800.000.000	
TENAGA KERJA																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	6.154.070.052	100%	6.338.692.153	100%	6.528.852.918	100%	6.724.718.505	100%	6.926.460.060	100%	7.134.253.862	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen (%)	N/A	0	0	15	181.500.000	20	199.650.000	25	219.615.000	30	1.127.357.000	35	1.240.092.700	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen (%)	5	10	7.000.000.000	15	7.210.000.000	20	7.426.300.000	25	7.649.089.000	30	7.878.561.670	35	8.114.918.520	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Persen (%)	5	10	6.785.215.000,00	15	6.988.771.450,00	20	7.198.434.593	25	7.414.387.631	30	7.636.819.260	35	7.865.923.838	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak	Persen (%)	5	10	5.183.197.000	15	5.338.692.910	20	5.498.853.697	25	5.663.819.308	30	5.833.733.837	35	6.008.745.904	

	pekerja dan Dialog Sosial															
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-hak Dasarnya	Persen (%)	N/A	0	0	5	770.000.000	10	847.000.000	15	931.700.000	20	1.024.870.000	25	1.127.357.000	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen (%)	8 Laporan	10%	441.168.000	15%	500.000.000	20%	510.000.000	25%	561.000.000	30%	617.000.000	35%	678.810.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen (%)	3 Dokumen	20%	550.000.000	20%	605.000.000	25%	665.500.000	30%	710.000.000	35%	735.000.000	45%	806.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persen (%)	6 Dokumen	10%	500.000.000	15%	1.000.000.000	20%	1.100.000.000	25%	1.100.000.000	30%	1.200.000.000	35%	1.500.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan	Persen (%)	8 Dokumen	5%	358.832.000	10%	510.200.000	15%	765.300.000	20%	1.000.000.000	25%	1.250.000.000	30%	1.450.000.200	

PROGRAM PEMENUHAN ANAK (PHA)	HAK	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Persen (%)	1 Dokum en	10%	358.832.000	15%	650.000.000	20%	715.000.000	25%	500.000.000	30%	786.500.000	35%	898.200.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Persen (%)	1 Kegiata n	10%	500.000.000	15%	600.000.000	20%	650.000.000	25%	700.000.000	30%	786.500.000	35%	900.256.000	
PANGAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.030.000.000	100%	1.060.900.000	100%	1.092.727.000	100%	1.125.508.810	100%	1.159.274.074		1.194.052.296	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	N/A	10%	4.944.000.000	20%	5.092.320.000	30%	5.245.089.600	40%	5.402.442.288	50%	5.564.515.556	10%	5.731.451.023	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	N/A	10%	9.393.600.000	20%	9.675.408.000	30%	9.965.670.240	40%	10.264.640.347	50%	10.572.579.557	10%	10.889.756.944	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen (%)	N/A	10%	1.606.800.000	20%	1.655.004.000	30%	1.704.654.120	40%	1.755.793.743	50%	1.808.467.555	10%	1.862.721.582	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Pangan Segar yang memenuhi Prasyarat dan Mutu Keamanan Pangan	Persen (%)	N/A	10%	2.224.800.000	20%	2.291.544.000	30%	2.360.290.320	40%	2.431.099.029	50%	2.504.032.000	10%	2.579.152.960	
PERTANAHAN																	

DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan Tepat Waktu	Persen (%)	10	10	125.609.200	12	163,291,960	14	212,279,548	15	275,963,412	16	339,647,276	16	400.000.000	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	Persen (%)	0	0	0	55	325.000	60	422.500	64	549.250	67	614.025	69	614.025	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persen (%)	10	10	1.073.389.700	10	1,395,406,610	20	1,814,028,593	30	2,358,237,170	40	3,065,708,321	40	3,065,708,321	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen (%)	0	0	0	35	1.500.000.000	35	1.500.000.000	40	2.000.000.000	45	2.000.000.000	50	2.500.000.000	
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Tanah Ulayat yang ditetapkan	Persen (%)	0	0	0	50	530.000.000	55	600.000.000	60	650.000.000	60	700.000.000	60	700.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong yang dikelola	Persen (%)	0	0	0	35	450.000.000	40	500.000.000	45	550.000.000	45	550.000.000	50	600.000.000	

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persen (%)	35	35	440.750.000	40	572,975,000	45	744,867,500	50	968,327,75 0	55	1,258,826,0 75	55	1,258,826,0 75	
PROGRAM PENGURUSAN HAK- HAK ATAS TANAH	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Persen (%)	0	0	0	40	550.000.000	45	600.000.000	50	700.000.00 0	50	700.000.00 0	55	750.000.00 0	
PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	Persen (%)	0	0	0	55	330.000.000	60	350.000.000	65	380.000.00 0	65	380.000.00 0	65	400.000.00 0	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen (%)	N/A	0	0	7	450.000.000	10	500.000.000	12	550.000.00 0	13	560.000.00 0	14	580.000.00 0	
PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU	Persentase Pertanahan di wilayah pesisir , laut dan pulau yang tertata	Persen (%)	N/A	0	0	12	550.000.000	15	600.000.000	20	700.000.00 0	21	750.000.00 0	22	790.000.00 0	
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Persentase Informasi Pertanahan yang dimanfaatkan	Persen (%)	0	0	0	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.00 0	1	360.000.00 0	1	390.000.00 0	
PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA PERKARA PERTANAHAN	Persentase penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan	Persen (%)	N/A	0	0	43	500.000.000	45	500.000.000	50	520.000.00 0	51	530.000.00 0	52	540.000	
LINGKUNGAN HIDUP																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.00 0	100%	1.500.000.0 00	100%	1.500.000.0 00	100%	1.500.000.0 00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen (%)	20	20	1.796.488.000	22	2,335,434,400	23	3,036,064,720	24	3,946,884,136	25	5,130,949,376	25	5,130,949,376	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Angka Indeks	57,88	57,89	985.878.000	57,90	1,971,756,000	57,91	2,563,282,800	57,92	3,332,267,640	57,93	4,331,947,932	57,93	4,331,947,932	
	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Persen (%)	N/A	0	0	35	400.000.000	40	400.000.000	45	450.000.000	46	460.000.000	49	480.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	Persen (%)	N/A	10	486.720.000	11	632,736,000	12	822,556,800	13	1,069,323,840	13	1,390,120,992	13	1,390,120,992	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikelola	Persen (%)	N/A	0	0	6000	2.000.000.000	7000	2.000.000.000	8000	2.500.000.000	8000	2.500.000.000	9000	3.000.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah	N/A	0	0	25	320.000.000	35	350.000.000	40	400.000.000	43	420.000.000	43	430.000.000	

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang di tingkatkan Kapasitasnya	Persen (%)	N/A	0	0	1	170.000.000	1	200.000.000	2	220.000.000	2	230.000.000	2	240.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan lingkungan Hidup yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen (%)	0	0	250.000	10	260.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	16	350.000.000	18	390.000.000	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen (%)	N/A	0	0	10	150.000	12	200.000	14	220.000	14	230.000	15	240.000	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindakan Pidana Lingkungan Hidup	Persen (%)	0	0	0	5	500.000.000	6	550.000.000	7	605.000.000	8	665.500.000	8	665.500.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	0	30	30.000.000.000	32	33.000.000.000	35	36.300.000.000	40	43.923.000.000	45	43.923.000.000	45	43.923.000.000	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan identitas Kependudukan Digital	Persen (%)	N/A	5%	1.900.000.000	5%	1.900.000.000	10%	1.995.000.000	15%	2.094.750.000	20%	2.199.487.500	25%	2.309.461.875	

	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen (%)	N/A	5%	1.950.000.000	5%	1.950.000.000	10%	2.047.500.000	15%	2.149.875.000	20%	2.257.368.750	25%	2.370.237.188	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen (%)	N/A	5%	800.000.000	5%	800.000.000	10%	840.000.000	15%	882.000.000	20%	926.100.000	25%	972.405.000	
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen (%)	N/A	5%	2.000.000.000	5%	2.000.000.000	10%	2.100.000.000	15%	2.205.000.000	20%	2.315.250.000	25%	2.431.012.500	
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen (%)	N/A	5%	1.999.000.000	5%	1.999.000.000	10%	2.098.950.000	15%	2.203.897.500	20%	2.314.092.375	25%	2.429.796.994	
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen (%)	N/A	5%	450.000.000	5%	450.000.000	10%	472.500.000	15%	496.125.000	20%	520.931.250	25%	546.977.812	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Peningkatan Tertib Administrasi dan kepemilikan Dokumen, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	N/A	5%	1.842.718.000	10%	1.934.853.900	15%	2.031.596.595	20%	2.133.176.425	25%	2.239.835.246	30%	2.351.827.008	

	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	N/A	5%	2.061.565.000	10%	2.164.643.250	15%	2.272.875.412	20%	2.386.519.183	25%	2.505.845.142	30%	2.631.137.399	
	Persentase Peningkatan Laporan Kerja Instansi Pemerintahan	%	N/A	5%	286.056.000	10%	300.358.800	15%	315.376.740	20%	331.145.577	25%	347.702.855	30%	365.087.997	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	N/A	5%	300.000.000	5%	300.000.000	10%	315.000.000	15%	330.750.000	20%	347.287.500	25%	364.651.875	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ATAU KAMPUNG																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Des	Persen (%)	N/A	5%	2.000.000.000	5%	2.000.000.000	10%	2.100.000.000	15%	2.205.000.000	20%	2.315.250.000	25%	2.431.012.500	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerja sama Desa	Persen (%)	N/A	5%	800.000.000	5%	800.000.000	10%	840.000.000	15%	882.000.000	20%	926.100.000	25%	972.405.000	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen (%)	N/A	5%	500.000.000	5%	500.000.000	10%	525.000.000	15%	551.250.000	20%	578.312.500	25%	607.753.125	
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persen (%)	N/A	5%	1.000.000.000	5%	1.000.000.000	10%	1.050.000.000	15%	1.102.500.000	20%	1.157.625.000	20%	1.215.506.250	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga	Persen (%)	N/A	5%	1.500.000.000	5%	1.500.000.000	10%	1.575.000.000	15%	1.653.750	20%	1.736.437.500	25%	1.823.259.375	

LEMBAGA ADAT MASYARAKAT DAN HUKUM ADAT	Kemasyarakatan Desa (LKD)															
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen (%)	N/A	5%	2.200.000.000	5%	2.200.000.000	10%	2.310.000.000	15%	2.425.500.000	20%	2.546.775.000	25%	2.674.113.750	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA	Disesuaikan dengan Konteks Daerah	Persen (%)	N/A	5%	1.600.000.000	5%	1.600.000.000	10%	1.680.000.000	15%	1.764.000.000	20%	1.852.200.000	25%	1.944.810.000	
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA	Persentase jumlah kampung dengan sumber daya aparatur kampung yang unggul dan kompeten untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan kampung yang memadai	Persen (%)	N/A	5%	1.911.969.000	10%	2.007.567.450	15%	2.107.945.822	20%	2.213.343.114	25%	2.324.010.269	30%	2.440.210.783	
	Persentase Jumlah Kabupaten yang memiliki Kampung dengan program BUMDes yang aktif	Persen (%)	N/A	5%	1.911.969.000	10%	2.007.567.450	15%	2.107.945.822	20%	2.213.343.114	25%	2.324.010.269	30%	2.440.210.783	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	20.712.014.890	100%	21.333.375.337	100%	21.973.376.597	100%	22.632.577.895	100%	23.311.555.232	100%	24.010.901.888	DINKES P2KB

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate TF/R)	Angka	3,34	3,33	1,240,749,200	2,95	1.277.971.676	2,93	1.316.310.826	2,91	1.355.800.151	2,89	1.396.474.156	2,98	1.438.368.380	
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Angka Spesific Fertility Rate / ASTER 15-19)	Nas	2,97	2,97	1.000.000.000	2,95	1.030.000.000	2,93	1.060.900.000	2,91	1.092.727.000	2,89	1.125.508.810	2,98	1.159.274.074	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persen (%)	11,39	11,39	938.316.000	13,39	995.459.444	15,39	995.459.444	17,39	1.025.323.228	19,39	1.056.082.295	19,39	1.087.765.412	
	Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen (%)	11,5	11,5	1.000.000	11,4	1.030.000	11,3	1.060.900	11,2	1.092.727	11,1	1.125.509	11,1	1.159.274	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Kesehatan Keluarga	NAS	72,5	50,5	4,599,146,123	52,5	4.737.120.507	55,5	4.879.234.122	58,5	5.025.611.146	60,5	5.176.379.430	60,5	5.331.670.864	
PERHUBUNGAN																DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	12.379.482.079,-	100%	12.750.866.541,-	100%	13.133.392.538,-	100%	13.527.394.314,-	100%	13.933.216.143	100%	14.351.212.627,-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Persen (%)	20	25	24.131.405.000,-	30	24.855.347.150,-	35	25.601.007.565,-	40	26.369.037.791,-	45	27.160.108.925	50	27.974.912.193,-	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	Persen (%)	20	25	15.672.198.000,-	30	16.142.363.940,-	35	16.626.634.858,-	40	17.125.433.904,-	45	17.639.196.921	50	18.168.372.829,-	
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Pengendalian KKOP	Persen (%)	20	25	54.850.916.802,-	30	56.496.444.306,-	35	58.191.337.635,-	40	59.937.077.764,-	45	61.735.190.097	50	63.587.245.800,-	

PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Cakupan Perlintasan Kereta Api di tangani	Persen (%)	N/A	0	0	5	2.500.000.000	10	2.575.000.000,-	15	2.731.817.500,-	20	2.813.772.025	20	2.898.185.186,-	
KOMUNIKASI DAN INFORMASI																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.00	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	DINAS KOMUNIASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persen (%)	60	60	1.000.000.000	70	1.000.000.000	70,5	2.000.000.00	72	1.000.000.000	72,5	2.000.000.000	73	2.000.000.000	
PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen (%)	2	2	30.000.000.000	2,1	55.000.000.000	2,2	55.000.000.000	2,3	55.000.000.000	2,4	55.000.000.000	2,5	55.000.000.000	
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100	7.637.194.455	100	7.866.310.288,65	100	8.102.299.597	100	8.345.368.585	100	8.595.729.643	100	8.853.601.532	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen (%)	N/A	50	1.356.680.000	55	1.397.380.400	60	1.439.301.812	65	1.482.480.866	70	1.526.955.292	80	1.572.763.950	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan Pemeriksaan Koperasi	Persen (%)	N/A	50	800.000.000	55	824.000.000	60	848.720.000	65	1.145.772.000	70	1.180.145.160	80	1.215.549.515	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Persen (%)	N/A	50	724.320.000	55	746.049.600	60	768.431.088	65	791.484.020	70	815.228.540	80	839.685.396	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan	Persen (%)	N/A	50	793.413.000	55	864.875.958	50	890.822.237	65	917.546.904	70	945.073.311	80	973.425.510	

	Fasilitasi Pelatihan															
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen (%)	N/A	50	4.200.000.000	55	4.326.000.000	60	4.455.780.000	65	4.589.453.400	70	4.727.137.002	80	4.868.951.112	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi ke formal	Persen (%)	N/A	50	5,418,803,000	55	5,418,803,000	60	5,718,803,000	65%	6,000,000,000	70%	6,150,000,000	80%	6,555,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persen (%)	N/A	50	5.418.803.000	55	5.581.367.090	60	5.748.808.102	65	5.921.272.345	70	6.098.910.515	80	6.281.877.830	
PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Persentase Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen (%)	N/A	50	2.800.000.000	55	2.884.000.000	60	2.970.520.000	65	3.059.635.600	70	3.151.424.668	80	3.245.967.408	
PENANAMAN MODAL																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Persen (%)	N/A	80%	842.828.800	80%	389.774.000	85%	1.271.580.200	85%	471.626.540	90%	518.789.194	100%	570.668.113	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	Persen (%)	N/A	-	0	-	-	80%	349.869.200	80%	384.856.120	85%	423.341.732	90%	465.675.905	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen (%)	N/A	80%	1.214.384.600	80%	1.335.823.060	85%	1.469.405.366	85%	1.616.345.903	90%	1.777.980.493	90%	1.955.778.542	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi	Persen (%)	N/A	80%	1.301.467.800	80%	1.431.614.580	85%	1.574.776.038	85%	1.732.253.642	90%	1.905.479.006	90%	2.096.026.907	

DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
PROVINSI
PAPUA
TENGAH

	pelaku usaha dalam membuka usaha															
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan informasi Penanaman Modal	Persen (%)	N/A	-	0	80%	160.269.450	80%	176.296.395	85%	193.926.035	85%	213.318.638	90%	234.650.502	
PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	Persentase kerja sama penanaman modal yang di tindaklanjuti	Persen (%)		-	0	-	0	-	0	80%	349.869.200	80%	384.856.120	90%	423.341.732	
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi kepemudaan yang aktif (satuan, persen)	Persen (%)	N/A	100	6.700.000.000	100	7.370.000.000	100	8.107.000.000	100	8.917.700.000	100	9.809.470.000	100	13.875.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pengembangan daya saing keolahragaan (satuan, persen)	Persen (%)	N/A	12,05	20.000.000.000	18,53	22.000.000.000	25,03	24.200.000.000	31,53	26.620.000.000	38,03	29.282.000.000	44,53	40.786.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang berperan aktif (satuan, persen)	Persen (%)	N/A	100	5.500.000.000	100	6.050.000.000	100	6.655.000.000	100	7.32.500.000	100	8.052.550.000	100	13.689.000	
STATISTIK																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan	Persen (%)	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	DINAS KOMUNIASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	Pemerintahan Daerah															
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2	2	1.500.000.000	2,1	2.000.000.000	2,2	2.500.000.000	2,3	2.500.000.000	2,4	2.500.000.000	2,5	2.500.000.000	
PERSANDIAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	DINAS KOMUNIASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen (%)	5	10	1.500.000.000	15	2.000.000.000	20	2.500.000.000	25	2.500.000.000	30	2.500.000.000	35	2.500.000.000	
KEBUDAYAAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen (%)	N/A	60	129.586.496.000	64	42.408.112.560	60	46.848.923.816	72	51.513.816.198	76	56.645.197.817	80	62.289.717.599	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Penguatan Lembaga budaya ,sanggar seni ,dan komunitas kreatif guna memperluas ruang ekspresi dan inovasi budaya	Persen (%)	N/A	0	0	56	3.303.586.000	60	3.633.944.600	64	3.997.339.060	68	4.397.072.966	70	4.836.780.263	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap	Persen (%)	N/A	0	0	10	3.303.586.000	15	3.633.944.600	20	3.997.339.060	25	4.397.072.966	30	4.836.780.263	

[illegible]

	Pemerintahan Daerah															
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	0	0	0	20	300.000.000	40	315.000.000	60	330.750.000	80	347.287.500	100	399.380.625	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	0	0	0	20	150.000.000	40	157.500.000	60	181.125.000	80	208.293.750	100	218.708.438	
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	%	0	0	0	20	100.000.000	40	105.000.000	60	110.250.000	80	115.762.500	100	121.550.625	
PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI	Persentase SDM Bidang Kearsipan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	0	0	0	20	120.000.000	30	126.000.000	50	132.300.000	80	138.915.000	100	145.860.750	
KELAUTAN DAN PERIKANAN																
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen (%)	N/A	0,59	17.461.280.134,80	0,6	17.985.118.538,84	0,7	18.524.672.095,01	0,8	19.080.412.257,86	0,9	19.652.824.625,60	1	20.242.409.364,36	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Perikanan Tangkap	Persen (%)	5	10	33.372.000.000	20	34.373.160.000	30	35.404.354.800	40	36.466.485.444	50	37.560.480.007,32	60	38.687.294.407,54	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perikanan Budidaya	Persen (%)	5	10	10.876.800.000	20	11.203.104.000	30	11.539.197.120	40	11.885.373.033,60	50	12.241.934.224,61	60	12.609.192.251,35	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi	Persen (%)	5	10	5.932.800.000	20	6.110.784.000	30	6.294.107.520	40	6.482.930.745,60	50	6.677.418.667,97	60	6.877.741.228,01	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	Persen (%)	5	10	17.447.815.774,98	20	17.971.250.248,23	30	18.510.387.755,68	40	19.065.699.388,35	50	19.637.670.370	60	20.226.800.481,10	
																DINAS PANGAN, ERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

PARIWISATA																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.00	100%	1.500.000.00	100%	1.500.000.00	100%	1.500.000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen (%)	N/A	100	15.000.000.000	100	16.500.000.000	100	18.150.000.00	100	19.965.000.000	100	21.961.500.000	100	15.000.000.000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen (%)	N/A	4	5.000.000.000	4	6.050.000.000	4	6.655.000.00	4	7.320.000.00	4	8.052.000.00	4	5.000.000.00	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen (%)	N/A	100	8.000.000.000	100	7.700.000.000	100	8.400.000.00	100	9.240.000.00	100	10.324.000.000	100	8.000.000.00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan Tervalidasi	Persen (%)	N/A	100	10.000.000.000	100	5.500.000.000	100	6.050.000.00	100	7.320.000.00	100	8.052.000.00	100	10.000.000.000	
PERTANIAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.030.000.000	100%	1.060.900.000	100%	1.092.727.00	100%	1.125.508.810	100%	1.159.274.074,30	100%	1.194.296.296,53	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen (%)	N/A	10%	53.228.340.000	20%	54.825.190.200	30%	56.469.945.906	40%	58.164.044.283,18	50%	59.908.965.611,68	10%	61.706.234.580,03	

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Persen (%)	N/A	10%	37.574.400.000	20%	38.701.632.000	30%	39.962.680.9 60	40%	41.058.561. 388,80	50%	42.290.318. 230,46	10%	43.559.027. 777,38	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen (%)	N/A	10%	2.706.976.269	20%	2.788.185.557, 07	30%	2.871.831.12 3,78	40%	2.957.986.0 57,50	50%	3.046.752.6 39,22	10%	3.138.127.4 08,40	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen (%)	N/A	10%	1.977.600.000	20%	2.036.928.000	30%	2.098.035.84 0	40%	2.160.976.9 15,20	50%	2.225.806.2 22,66	10%	2.292.580.4 09,34	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	Persen (%)	N/A	10%	1.977.600.000	20%	2.036.928.000	30%	2.098.035.84 0	40%	2.160.976.9 15,20	50%	2.225.806.2 22,66	10%	2.292.580.4 09,34	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi	Persen (%)	N/A	10%	4.326.000.000	20%	4.455.780.000	30%	4.589.453.40 0	40%	4.727.137.0 02	50%	4.686.951.1 12,06	10%	5.015.019.6 45,42	
KEHUTANAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.00 0	100%	1.500.000.0 00	100%	1.500.000.0 00	100%	1.500.000.0 00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	Persentase Dokumen Inventarisasi Hutan	Persen (%)	N/A	10	4000.000.000	10%	14.591.800.300	15%	16.050.980.3 30	20%	16.050.980. 330	25%	19.421.686. 199	30%	19.421.686. 199	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Persen (%)	N/A	0,59	1.000.000.000	0,6	1.000.000.000	0,7	1.100.000.00 0	0,8	1.210.000.0 00	0,9	1.331.000.0 00	1	1.331.000.0 00	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Keanekaragam an Hayati	Persen (%)	N/A	10%	3.455.748.000	15%	3.801.322.800	20%	4.181.455.08 0	25%	4.599.600.5 88	30%	5.059.560.6 46	30%	5.059.560.6 46	

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH dan KUPS yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan	Persen (%)	N/A	0	0	10	5.000.000.00	15	5.5000.000.000	20	6.050.000.000	25	6.655.000.000	25	6.655.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase tutupan Lahan pada sempadan sungai	Persen (%)	N/A	0	0	5%	1.000.000.000	6%	1.100.000.000	7%	1.121.000.000	8%	1.331.000.000	8%	1.331.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	Persentase Hutan Adat yang Terkelola	Persen (%)	N/A	10	4000.000.000	10%	14.591.800.300	15%	16.050.980.330	20%	16.050.980.330	25%	19.421.686.199	30%	19.421.686.199	
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	DINAS TENAGA, TRANSMIGA DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Jumlah volume air Tanah pada cekungan air tanah di wilayah Sungai lintas Kabupaten/Kot a	Persen (%)	N/A	5%	0	10%	220.000.000	15%	242.000.000	20%	266.200.000	25%	292.820.000	30%	322.102.000	
	Luas Zona konservasi Air Tanah pada cekungan air tanah di wilayah Sungai lintas Kabupaten/Kot a	Persen (%)	N/A	5%	0	10%	220.000.000	15%	242.000.000	20%	266.200.000	25%	292.820.000	30%	322.102.000	
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Luas WPR diusulkan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	N/A	5%	1.020.552.000	10%	1.051.168.560	15%	1.082.703.616	20%	1.115.184.725	25%	1.148.640.267	30%	1.183.099.475	
	Jumlah rekomendasi terhadap usulan IPR	Persen (%)	N/A	5%	1.020.552.000	10%	1.051.168.560	15%	1.082.703.616	20%	1.115.184.725	25%	1.148.640.267	30%	1.183.099.475	

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah Rumah Tangga penerima listrik yang bersumber dari pembangkit EBT	Persen (%)	N/A	5%	0	10%	440.000.000	15%	484.000.000	20%	532.400.00 0	25%	585.640.00 0	30%	644.204.00 0	
	Porsi EBT dalam Bauran Energi	Persen (%)	N/A	5%	0	10%	440.000.000	15%	484.000.000	20%	532.400.00 0	25%	585.640.00 0	30%	644.204.00 0	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	Persen (%)	20	25%	50.000.000.00 00	30%	51.500.000.000 00	35%	53.045.000.0 00	40%	54.636.350. 000	45%	56.275.440. 500	50%	57.963.703. 715	
PERDAGANGAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.00 0	100%	1.500.000.0 00	100%	1.500.000.0 00	100%	1.500.000.0 00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N, DAN PERDAGANGA
PROGRAM PERIZINAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan Yang difasilitasi	Persen (%)	N/A	50	4,135,147,600	55	4,259,202,028	60	4,386,978,08 9	65	4,518,587,4 32	70	4,654,146	80	4,792,769,4 06	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana Perdagangan Yang ditingkatkan Kualitasnya	Persen (%)	N/A	0	0	50	15.750.000.000	55	16.222.500.0 00	65	16.709.175. 000	70	17.210.450. 250	80	17.726.763. 757	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen (%)	N/A	50	25.268.927.500	55	26.026.995.325	60	26.807.805.1 85	65	27.612.039. 341	70	28.440.400. 521	80	29.293.612. 537	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	Persen (%)	N/A	0	0	50	750.000.000	55	772.500.000	60	795.675.00 0	65	819.545.25 0	85	844.131.60 7	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen (%)	N/A	0	0	50	750.000.000	55	772.500.000	60	795.675.00 0	65	819.545.25 0	85	844.131.60 7	

PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan barang produk dalam negeri	Persen (%)	N/A	0	0	50	500.000.000	55	515.000.000	60	530.450.00 0	65	546.363.50 0	75	562.754.40 5	
PERINDUSTRIAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.00 0	100%	1.500.000.0 00	100%	1.500.000.0 00	100%	1.500.000.0 00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N, DAN PERDAGANGA
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen (%)	50	50	20.632.098.111	55	21.251.061.054	60	21.888.592.8 86	65	22.545.250. 673	70	23.221.608. 193	80	23.918.256. 439	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	Persen (%)	50%	0	0	50	600.000.000	55	618.000.000	60	636.540.00 0	65	655.636.20 0	75	675.305.28 6	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persen (%)	50	50	1.600.000.000	55	1.648.000.000	60	1.697.440.00 0	65	1.748.363.2 00	70	1.800.814.0 96	80	1.854.838.5 19	
TRANSMIGRASI																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.00 0	100%	1.500.000.0 00	100%	1.500.000.0 00	100%	1.500.000.0 00	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigraasi yang dilaksanakan	Persen (%)	5	10	3.850.000.000	15	4.235.000.000	20	4.658.500.00 0	25	5.124.350.0 00	30	5.636.785.0 00	35	6.200.463.5 00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang dibina dan diberdavakan	Persen (%)	5	10	3.756.500.000	15	4.132.150.000	20	4.545.365.00 0	25	4.999.901.5 00	30	5.499.891.0 00	35	6.049.880.8 15	

SEKRETARIS DAERAH																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	90	100	175.293.603.245	100	184.058.283.408	100	193.261.197.578	100	202.924.257.457	100	213.070.470.330	100	223.723.993.847	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	0	1	6.700.000.000	1	7.035.000.000	2	7.386.750.000	2	7.756.087.500	3	8.143.891.875	3	8.551.086.469	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Efektivitas Kerja Sama Derah; dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen (%)	100	100	30.992.679.000	100	32.542.312.950	100	34.169.428.598	100	35.877.900.028	100	37.671.795.029	100	39.555.384.781	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen (%)	100	100	30.407.320.900	100	31.927.686.945	100	33.524.071.292	100	35.200.274.857	100	36.960.288.600	100	38.808.303.030	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan	Persen (%)	100	100	4.000.000.000	100	4.200.000.000	100	4.410.000.000	100	4.630.500.000	100	4.862.025.000	100	5.105.126.250	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen (%)	100	100	4.600.000.000	100	4.830.000.000	100	5.071.500.000	100	5.325.075.000	100	5.591.328.750	100	5.870.895.188	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat Kematangan UKPBJ	indeks	4	5	9.259.999.550	6	9.723.000.000	7	10.209.150.000	8	10.719.607.000	9	11.255.588.000	9	11.818.367.400	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen (%)	100	100	900.000.000	100	945.000.000	100	992.250.000	100	1.041.862.500	100	1.093.955.625	100	1.148.653.406	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi	Persen (%)	70	90	2.999.999.900	100	3.149.999.895	100	3.307.499.890	100	3.472.874.885	100	3.646.518.629	100	3.828.844.561	

	Orang Asli Papua (OAP)															
SEKRETARIAT DPR																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100	100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	SEKRETARIAT DPRP
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persen (%)	75	75	113.683.685.749	80	125.052.054.324	85	137.557.259.756.	90	151.312985.732	95	166.444.284.305	100	183.088.712.735	
PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen (%)	75	75	171.998.746.000	80	189.198.620.600	85	208.118.482.600	90	228.930.330.926	95	251.823.364.019	100	23.324.156.318	
PROGRAM SEKRETARIAT DPRD PAPUA	Persentase pelaksanaan Sekretairat DPRD	Persen (%)	75	75	14.482.466.000	80	15.930.712.600	85	17.523.783.860	90	19.276.162.246	9	21.203.778.471	100	23.324.156.318	
PERENCANAAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100	100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD Dengan RKPD	Persen (%)	N/A	90	5.152.887.350	95	5.410531.717.5	95	5.681.058.303	95	5.965.111.219	95	6.263.366.779	95	6.576.535.118	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen (%)	N/A	5	5.152.887.350	10	5.410.531.717,5	15	5.681.058.303	20	5.965.111.219	25	6.263.366.779	30	6.576.535.118	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang	Persen (%)	N/A	90	1.752.653.848	95	1.840.286.540	95	1.932.300.867	95	2.028.915.910	95	2.130.361.706	95	2.236.879.791	

[illegible]

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen (%)	N/A	10	2.723.180.000	15	2.723.180.000	20	2.723.180.00	25	2.723.180.000	30	2.723.180.000	35	2.723.180.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen (%)	13	13	3.632578.115	15	3.632578.115	15	3.632578.115	20	3.632578.115	20	3.632578.115	25	3.632578.115	
KEPEGAWAIAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100	100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.00	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	Persen (%)	100	100	7,054,809,000	100	6,856,945,800	100	5,359,203,550	100	6,071,049,760	100	5,120,035,872.50	100	7,054,809,000	
	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen (%)	40	40	5,768,776,668	45	6,394,6124,694.20	50	6,406,683,003.41	55	6,419,869,228.08	60	6,433,714,763.98	40	5,768,776,668	
	Persentase Pengembangan Kasis ASN Sesuai dengan Kompetensi	Persen (%)	20	20	2,454,118,619.00	25	2,099,798,619.00	30	2,099,798,619.00	35	2,099,798,619.00	40	2,099,798,619	20	2,454,118,619.00	
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen (%)	95	95	354,320,000,00	95	354,320,000,00	95	354,320,000,00	95	354,320,000,00	95	354,320,000,00	95	354,320,000,00	
	Persentase ASN yang di tingkatkan Kompetensinya	Persen (%)	20	20	5,277,109,000,00	25	5,277,109,000,00	30	5,277,109,000,00	35	5,277,109,000,00	40	5,277,109,000,00	20	5,277,109,000,00	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100	100	1.000.000.000	100\	1.500.000.000	100	1.500.000.00	100	1.500.000.000	10	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN Yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, Manajerial dan Fungsional	Persen (%)	50	50	23,994,071,914.00	52	22,494,480,914.00	55	22,494,480,914.00	57	4,494,480,914.00	60	22,494,480,914.00	50	23,994,071,914.00	
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen (%)	100	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	
	Persentase ASN Yang didapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen (%)	15	15	1,000,000,000.00	20	1,000,000,000.00	25	1,000,000,000.00	30	1,000,000,000.00	35	1,000,000,000.00	15	1,000,000,000.00	
	Persentase Realisasi Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	Persen (%)	100	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100	100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen (%)	N/A	90	914.742.500	95	960.479.625	95	1.008.503.606	95	1.058.928.787	95	1.111.875.226	95	1.167.468.987	
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam	Persen (%)	N/A	90	914.742.500	95	960.479.625	95	1.008.503.606	95	1.058.928.787	95	1.111.875.226	95	1.167.468.987	

	Kebijakan Pembangunan Daerah															
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen (%)	N/A	90	914.742.500	95	960.479.625	95	1.008.503.606	95	1.058.928.787	95	1.111.875.226	95	1.167.468.987	
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persen (%)	N/A	90	914.742.500	95	960.479.625	95	1.008.503.606	95	1.058.928.787	95	1.111.875.226	95	1.167.468.987	
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persen (%)	N/A	10	500.000.000	11	500.000.000	12	500.000.000	13	500.000.000	14	500.000.000	14	500.000.000	
INSPEKTORAT DAERAH																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100	100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tidak lanjut hasil pengawasan ,persentase temuan yang ditindak lanjuti dan persentase	Persen (%)	N/A	49	10.640.497.000	60	10.700.000.000	65	10.800.000.000	70	10.900.000.000	75	11.000.000.000	80	11.000.000.000	INSPEKTORAT

	dan Efektivitas Pengawasan-															
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas penyelenggara n sistim pengendalian internal pemerintah (SPIP) kapasitas Aparat Pengawasan internal pemerintah(API P)	Persen (%)	N/A	1	4.216.860.500	1 %	4.300.000.000	2%	4.400.000.000	2%	4.450.000.000	2%	4.500.000.000	3%	4.500.000.000	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tersedianya Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100%	100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen (%)	N/A	100	14,422,041,000,00	100	15,864,245,100,00	100	17,450,669,610,00	100	19,195,736,571,000	100	21,115,310,228,10	100	21,115,310,228,10	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik Kader Partai Politik	Persen (%)	N/A	100	7,465,944,000,00	100	8,212,538,400,00	100	9,033,792,240,00	100	9,937,171,464,00	100	10,930,888,610,40	100	10,930,888,610,40	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen (%)	N/A	100	16,489,537,000,00	100	18,138,490,700,00	100	19,952,339,770,00	100	21,947,573,747,00	100	24,142,331,121,70	100	24,142,331,121,70	

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Persen (%)	N/A	100	5,853,931,000,00	100	6,439,324,100,00	100	7,083,256,510,00	100	7,791,582,161,00	100	8,570,740,377,10	100	8,570,740,377,10	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persen (%)	N/A	100	70,416,366,893,00	100	77,458,003,582,30	100	85,203,803,940,53	100	93,724,184,334,58	100	103,096,602,768,04	100	103,096,602,768,04	
KEKHUSUSAN PAPUA																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen (%)	100	100	38.123.011.611	100	39.660.000.000	100	43.626.000.000	100	47.989.000.000	100	52.787.000.000	100	58.066.000.000	MAJELIS RAKYAT PAPUA
PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA	Persentase Program Penunjang Lembaga MRP	Persen (%)	100	100	99.632.493.542	100	102.621.468.348	100	104.247.435.015	100	105.873.401.682	100	107.499.368.349	100	109.125.335.016	

Sumber Data : Hasil Kesepakatan Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua Tengah disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator	Target Tahun ke					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	128,7	141,7	154	166,7	179,4	192
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	22,64*	22,65	22,66	22,67	22,68	22,68
3	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	0,27 *	0,36	0,39	0,41	0,44	0,44
4	Tingkat Kemiskinan (%)	26,50 - 27,00	26,50 - 27,00	26,50 -27,00	26,50 - 27,00	20,50-21,50	20,50-22,15
5	Rasio Gini (indeks)	0,380 – 0,383	0,380 – 0,383	0,380 – 0,383	0,380 – 0,383	0,374-0,380	0,374-0,380
6	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
7	Pertumbuhan Ekonomi	5,2	6,05	6,9	7,75	8,6	9,45
8	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
9	Indeks Modal Manusia	0,42	0,427	0,435	0,442	0,45	0,457
10	a. Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	59,28	61,22	63,15	64,96	66,85	68,74
11	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	82,56	82,72	82,88	83,04	83,20	83,36
12	Usia harapan Hidup (UHH) (Tahun)	69,2	69,3	69,4	69,5	69,7	69,7
13	Kesehatan Ibu dan Anak:						
	a. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	449*	410	371	332	292	254
	b. Pravelensi Stunting (pendek dan Sangat Pendek) Pada balita (%)	33,1*	30,67	28,25	25,82	23,4	20,9
14	a Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	85	85	85	85	85	85
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	85	85	85	85	85	85
	c. Eliminasi Malaria Per Kabupaten	63	65	67	69	71	73
	d. Jumlah Infeksi Baru HIV per 1000 Penduduk di daerah terinfeksi	3.671	3.671	3.200	3.170	2.960	2.960
15	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Provinsi (%)	98,6	99	99	99	99	99
	Hasil Pembelajaran :						
	a. Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen tingkat nasional untuk :						
	ii) Literasi Membaca	12,50-12,50	12,50-12,50	12,50-12,50	12,50-12,50	12,50-25,00	12,50-25,00
	ii) Numerasi	0,00-12,50	0,00-12,50	0,00-12,50	0,00-12,50	12,50-25,00	12,50-25,00
	b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
	i)Literasi Membaca	21,24-23,74	21,24-23,74	21,24-23,74	21,24-23,74	26,23-28,73	26,23-28,73
	ii) Numerasi	15,68-	15,68-	15,68-18,18	15,68-	19,68-	19,68-

16	c. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)	6,25	6,72	7,2	7,67	8,15	8,62
17	d. Harapan Lama Sekolah	9,71	9,76	9,81	9,86	9,92	9,97
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,34	9,49	9,64	9,79	9,95	10,1
19	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	77,21	77,99	78,78	79,57	80,36	81,14
20	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	21,16	26,18	31,21	36,24	41,27	46,29
21	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	N/A	15	17	20	24	28
22	a. Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari unit layanan disabiitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	N/A	200	350	450	600	750
23	b. Jumlah Unit Layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di Tingkat kab/kota/provinsi	1	3	5	7	9	11
24	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	0,83	2,17	3,52	4,86	6,21	7,55
25	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,8	4,32	4,85	5,37	5,9	6,42
26	Pengembangan Pariwisata						
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,22	0,222	0,225	0,227	0,23	0,232
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (orang)*	4,45	4,67	4,9	5,12	5,35	5,75
27	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	N/A	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
28	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						
	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	0,36	0,367	0,375	0,382	0,39	0,397
	b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,63*	1,63*	1,75	1,80	1,83	1,85
	c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,41	0,46	0,52	0,57	0,63	0,68
	d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,17	1,172	1,175	1,177	1,18	1,182
	e) <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	1,95	2,03	2,11	2,19	2,28	2,36
29	Penciptaan Lapangan Kerja yang baik						
	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,65 – 3,12	2,65 – 3,12	2,65 – 3,12	2,65 – 3,12	2,00-2,40	2,00-2,40
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	20	21,5	23	24,5	26	27,5
30	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,45 – 65,00	53,45 – 65,00	53,45 – 65,00	62,70- 67,31	62,70- 67,31	62,70- 67,31
31	Tingkat Penguasaan IPtek	15	20	25	30	35	40
32	Indeks Reformasi Hukum	70	70,3	70,7	71,1	71,5	71,8
33	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,00	2,12	2,24	2,36	2,48	2,6
34	Indeks Pelayanan Publik	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16
35	Indeks Integritas Nasional	62,98	63,65	64,32	64,99	65,66	66,33
36	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3,2	3,6	4	4,4	4,8	5,2
37	Rasio Elektrifikasi RT (%)	47,36	47,36	47,80	48	48,5	49
38	Indeks Kepemimpinan Daerah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
39	Persentase Penurunan Konfilk Sara	N/A	40	43	45	48	50
40	Usulan Proksi :						
	a. Persentase penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	71,4	72,8	74,2	75,7	77,1
	b. Persentase Capaian Pelaksanaan ...	60	62.5	65	67.5	70	72.5

41	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya (%)	74	74,7	75,5	76,2	77	77,7
42	Indeks Demokrasi Indonesia	60,00-63,25	60,00-63,25	60,00-63,25	60,00-63,25	60,00-63,85	60,00-63,85
43	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	49,54-49,61	49,54-49,61	49,54-49,61	49,54-49,61	51,4 – 51,59	51,4 – 51,59
44	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,18-81,22	81,18-81,22	81,18-81,22	81,18-81,22	82,66-82,9	82,66-82,9
45	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	50,65	52,36	54,07	55,78	57,5	59,21
46	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	81,94-82,01	82,05-82,17	82,17-82,32	82,29-82,46	82,42-82,61	82,56-82,78
47	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	20,2	19,8	19,4	19	18,7	18,3
48	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,9	24,64-25,48	24,64-25,48	24,64-25,48	24,64-25,48	24,64-25,48
49	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	48,82-49,14	48,82-49,14	48,82-49,14	50,24-50,88	50,24-50,88	50,24-50,88
50	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,39	0,45	0,51	0,57	0,64	0,70
51	Tingkat Inflasi (%)	3,6-5,3	3,6-5,3	3,6-5,3	3,6-5,3	2,2-5,2	2,2-5,2
52	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:						
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	16,74	17,59	18,45	19,30	20,16	21,01
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,29	0,30	0,32	0,33	0,35	0,36
	c. Nilai Transaksi saham per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	856.520,71	984.209	1.111.897	1.239.586	1.367.274,09	1.494.962
	d. Total Kredit/PDRB (%)	13,02	13,18	13,35	13,51	13,68	13,84
	e. Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	2,71	2,76	2,81	2,85	2,9	2,93
53	Inklusi Keuangan (%)	86,79	87,29	87,79	88,29	88,8	89,30
54	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan:						
	a. Proporsi Kontribusi PDRB wilayah Provinsi Terhadap Nasional	0,73	0,73	0,75	0,78	0,80	0,82
	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	22,96	23,47	23,98	24,49	25	25,51
	c. Persentase Desa mandiri	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
	d. Persentase Mantap Jalan	35	35	36	38	40	45
55	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61,06	62,23	63,4	64,57	65,74	66,91
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	26,6	26,6	26,9	27,3	27,9	28
56	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,389	0,389	0,394	0,400	0,425	0,425
57	Kualitas Lingkungan Hidup:						
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	82,56	82,56	82,65	82,73	83,20	83,20
	b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	4,0	5,89	7,86	9,67	10	11
	c. Pengelolaan Sampah						
	- Timbunan sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15,00	18,00	20,25	25,64	30	35
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	36	39	40	45	52	55
58	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan:						
	a. Ketahanan Energi						
	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	315	334	353	370	388	407
	- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	90	90	87	86	84	82
	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	34,03	33	31,2	29,4	29,23	29

	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0	1,5	1,5	2	2	3
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	20	20	25	30	30	35
59	Indeks Risiko Bencana	191,94	191,94-185,88	191,94-185,88	191,94-185,88	185,88-179,95	185,88-179,95
60	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
	- Kumulatif	10,92	11,5	12,87	14,35	15,35	15,45
	- Tahunan	30,07	30,4	30,53	30,78	30.93	40

Catatan: Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Papua Tengah Periode 2025-2029

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I.	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Persen (%)	36,74	40,86	44,13	47,88	52,19	57,41	57,41	64,30
2.	Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen (%)	34,04	33	31,2	29,4	26	25,4	25,4	25,4
3	Konsumsi Listrik Per kapita	Kwh/Kapita	315	315	334	353	370	388	407	407
4.	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	Persen (%)	81,53	82,53	83,53	84,53	85,53	86,53	86,53	86,53
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	80	82,56	82,56	82,65	82,73	83,20	83,20	83,20
6.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen (%)	3,0	4,0	5,89	7,86	9,67	10	11	11
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen (%)	N/A	30,07	30,4	30,53	30,78	30,93	40	40
8	Indeks Risiko Bencana	Angka	116,49	191,94	191,94-185,88	191,94-185,88	191,94-185,88	185,88-179,95	185,88-179,95	115
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen (%)	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
10	Rasio Penduduk	Persen (%)	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,19	1,20
11	Kepadatan Penduduk	Persen (%)	24,1	24,2	24,4	24,6	24,7	24,8	24,8	24,9
II.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	4,9	5,2	6,05	6,9	7,75	8,6	9,45	9,45
2.	Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	27,60	26,50 -27,00	26,50 -27,00	26,50 -27,00	26,50 -27,00	20,50-21,50	20,50-22,15	20,50-22,15
3.	PDRB Per Kapita	Rp Juta	119,5	128,7	141,7	154	166,7	179,4	192	179,4
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	2,75	2,65 – 3,12	2,65 – 3,12	2,65 – 3,12	2,65 – 3,12	2,00-2,40	2,00-2,40	2,00-2,40
5	Indeks Gini	Angka	0,383	0,380 – 0,383	0,380 – 0,383	0,380 – 0,383	0,380 – 0,383	0,374-0,380	0,374-0,380	0,374-0,380
6	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Angka	N/A	0,42	0,427	0,435	0,442	0,45	0,457	0,457
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	69	69,2	69,3	69,4	69,5	69,7	69,7	69,7
9	Prevelensi Stunting	Persen (%)	33,1	33,1	30,67	28,25	25,82	23,4	20,9	20,9
10	Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,17	6,25	6,72	7,2	7,67	8,15	8,62	8,62
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	9,63	9,71	9,76	9,81	9,86	9,92	9,97	9,97
12	Angka Literasi/Numerasi	Persen (%)	55	55,47	55,47	55,49	55,52	55,55	55,55	55,55
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	48,93	49	49,8	50,2	50,5	51	53	53
14	Indeks Literasi Digital	Angka	17,8	18	18,5	19,5	20	25	30	30
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen (%)	21	21,16	26,18	31,21	36,24	41,27	46,29	46,29
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	N/A	81,18-81,22	81,18-81,22	81,18-81,22	81,18-81,22	82,66-82,9	82,66-82,9	82,66-82,9
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	N/A	49,54-49,61	49,54-49,61	49,54-49,61	49,54-49,61	51,4 – 51,59	51,4 – 51,59	51,4 – 51,59
18	Indeks Perlindungan Anak	Angka	N/A	30	35	40	45	50	50	55
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	N/A	50,65	52,36	54,07	55,78	57,5	59,21	59,21
20	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	N/A	81,94-82,01	82,05-82,17	82,17-82,32	82,29-82,46	82,42-82,61	82,56-82,78	82,56-82,78
21	Indeks Pembangunan Gender	Angka	N/A	0,493	0,493	0,490	0,485	0,472	0,472	0,450
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	N/A	10	15	20	25	30	30	35
III.	ASPEK DAYA SAING DAERAH									

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Angka Ketergantungan	Persen (%)	N/A	41,6	41,6	40	40,2	39	39	38
2	Rasio PDRB industri Pengolahan	Persen (%)	N/A	0,83	2,17	3,52	4,86	6,21	7,55	7,55
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen (%)	N/A	0,22	0,222	0,225	0,227	0,23	0,232	0,232
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen (%)	N/A	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
5	Rasio Kewirausahaan	Persen (%)	N/A	0,41	0,46	0,52	0,57	0,63	0,68	0,68
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen (%)	76,99	77	77,5	78	78,5	79	79	79
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	N/A	30	40	50	55	60	65	65
8	Indeks ekonomi Hijau	Angka	N/A	61,06	62,23	63,4	64,57	65,74	66,91	66,91
9	Indeks ekonomi Biru Indonesia	Angka	N/A	22,64	23,52	24,40	25,29	26,17	27,06	27,06
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen (%)	N/A	26,6	26,6	26,9	27,3	27,9	28	28
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	N/A	3,2	3,6	4	4,4	4,8	5,2	5,2
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen (%)	23,9	23,9	24,64-25,48	24,64-25,48	24,64-25,48	24,64-25,48	24,64-25,48	24,64-25,48
13	Ekspor Barang dan Jasa	Persen (%)	N/A	48,82-49,14	48,82-49,14	48,82-49,14	50,24-50,88	50,24-50,88	50,24-50,88	50,24-50,88
14	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen (%)	N/A	30,94	30,94	31	31,5	31,8	31,8	32
15	Persentase Desa Mandiri	Persen (%)	N/A	0,01	0,03	0,05	0,06	0,08	0,08	0,08
16	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen (%)	0,39	0,39	0,40	0,43	0,45	0,48	0,48	0,48
17	Tingkat Inflasi	Persen (%)	4,2	3,25	3,10	3	2,83	2,5	2,5	2,5
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi hukum	Angka	N/A	70	70,3	70,7	71,1	71,5	71,8	71,8
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	N/A	2,00	2,12	2,24	2,36	2,48	2,6	2,6
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	N/A	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,16
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	N/A	62,98	63,65	64,32	64,99	65,66	66,33	66,33
5	Persentase Penegakan Perda	Persen (%)	N/A	10	20	30	40	50	50	60
6	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen (%)	N/A	60	60	63	65	68	68	69
7	Indeks Demokrasi Indonesia	Persen (%)	N/A	60,00-63,25	60,00-63,25	60,00-63,25	60,00-63,25	60,00-63,85	60,00-63,85	60,00-63,85
8	Indeks Rasa Aman	Angka	N/A	45	50	55	60	65	65	70
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	N/A	45	50	55	60	65	65	70
10	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	N/A	2,48	2,50	2,55	2,59	3,10	3,10	3,20
	Layanan Urusan Wajib Dasar									
1.	Pendidikan									
1.1.	Hasil Pembelajaran : Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen tingkat nasional untuk : Literasi Membaca	Persen (%)	5	12,5	15,63	18,76	19,35	19,95	19,95	23,08
1.2.	Numerasi	Persen (%)	21,67	12,5	15,63	18,76	19,35	19,95	19,95	23,08
1.3.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi	Persen (%)	5	9,34	9,35	9,36	9,65	9,96	9,96	13,09

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:									
	Literasi Membaca Numerasi	Tahun	21,67	55,47	55,49	55,52	57,26	59,05	59,05	62,18
1.4.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	6,17	6,25	6,72	7,2	7,67	8,15	8,62	8,62
1.5.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	9,63	9,71	9,76	9,81	9,86	9,92	9,97	15,79
1.6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Persen (%)	9,36	9,36	9,38	9,4	9,69	10,00	10,00	13,13
2.	Kesehatan									
2.1.	Usia harapan Hidup (UHH) (Tahun)	Tahun	69,2	69,2	69,3	69,4	69,5	69,7	69,7	69,7
2.2.	Kesehatan Ibu dan Anak									
	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Persen (%)	13,5	13,5	13,51	13,52	13,53	13,54	13,54	13,54
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita (%))	Persen (%)	91	91	91,2	91,25	91,28	91,30	91,30	91,30
2.3	Penanganan Tuberkulosis	Persen (%)	83	83	83,5	84,00	84,5	85	85	85
2.4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	Persen (%)	83	83	83,5	84,00	84,5	85	85	85
2.5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment Success rate</i>) (%)	Persen (%)	82	82,8	82,9	83	83,1	83,2	83,2	82,8
2.6	Eliminasi Malaria Per Kabupaten	Persen (%)	63	65	67	69	71	73	73	65
2.7	Jumlah Infeksi Baru HIV per 1000 Penduduk di daerah terinfeksi	Jiwa	3671	3671	3200	3170	2960	2650	2650	2450
2.8	cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Provinsi (%)	Persen (%)	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
3.1.	Pekerjaan Umum:									
3.2	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	M3/detik	3	3	3	3	3	3	3	3
3.3.	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persen (%)	0	1	2	3	4	5	5	5
3.4.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Kilometer	94,83	124,18	153,54	182,89	212,24	241,60	241,60	241,60
3.5	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen (%)	3,90	5,90	7,90	9,90	11,90	13,90	13,90	13,90

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.6	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Persen (%)	40	40	45	55	60	75	75	80
3.7.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen (%)	16,15	21,15	26,15	31,15	36,15	41,15	41,15	41,15
3.8	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen (%)	41,44	41,44	42,44	43,44	44,44	45,44	45,44	41,44
3.9	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen (%)	4,17	4,17	5	6,25	12,50	21,91	21,91	21,91
3.10	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen (%)	2,78	2,78	2,92	3,07	3,25	3,44	3,44	3,66
3.11	Rasio Jaringan Irigasi	Hektar (Ha)	314	334	354	374	394	414	414	414
3.12	Persentase penduduk berakses air minum	Persen (%)	81,53	82,53	83,53	84,53	85,53	86,53	86,53	86,53
3.13	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen (%)	81,53	82,53	83,53	84,53	85,53	86,53	86,53	86,53
3.14	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen (%)	0,00	5,01	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00	25,00
3.15	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Angka	1	2	3	4	5	5	5	5
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
4.1.	Rasio rumah layak huni	≥ 80% rumah masuk kategori layak huni (RJPMN 2025-2030)	25	25	27	30	33	36	36	39
4.2.	Rasio permukiman layak huni	≥ 75% permukiman memenuhi standar kelayakan (Inmendagri No. 2/2025)	25	25	27	30	33	36	36	39
4.3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	1:1 (rasio kebutuhan vs ketersediaan) (RJPMN 2025-2030)	25	25	27	30	33	36	36	39
4.4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	≥ 60% rumah terjangkau bagi	20	20	23	26	29	32	32	35

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		MBR (Permendagri 86)								
4.5.	Persentase pemukiman yang tertata	≥ 70% pemukiman terencana (Inmendagri No. 2/2025)	15	15	20	25	30	35	35	35
4.6.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	≤ 10% dari total pemukiman (RJPMN 2025- 2030)	10	10	12	14	16	18	18	20
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	≤ 15% luas perkotaan (Permendagri 86)	18	18	23	28	33	38	38	43
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	≤ 5% rumah tangga (Inmendagri No. 2/2025)	7	7	12	17	22	27	27	32
4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	≥ 80% permukiman memiliki PSU lengkap (RJPMN 2025- 2030)	35	35	38	41	44	47	47	50
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen (%)	0,6	30	35	40	45	50	50	60
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen (%)0	0	50	55	60	65	70	70	80
6.	Sosial									
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen (%)	50	50	55	57	64	67	67	70
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	Persen (%)	50	50	55	57	64	67	67	70
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemuahan kebutuhan dasar	Persen (%)	50	50	55	57	64	67	67	70
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen (%)	51	51	57	59	67	69	69	72

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen (%)	51	51	57	59	67	69	69	72
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen (%)	52	52	58	60	65	68	68	71
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen (%)	52	52	55	60	65	68	68	71
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen (%)	52	52	55	60	65	68	68	70
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen (%)	52	52	55	60	65	68	68	70
Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
1.	Tenaga Kerja									
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	sengketa	34	31	30	28	28	27	27	26
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	6	5	5	4	4	5	5	3
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen (%)	7	10	15	25	40	60	60	85
1.4.	Keselamatan dan perlindungan	Persen (%)	8	10	20	35	48	68	68	80
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	orang	24000	24300	24600	24700	24800	24900	24900	25000
1.6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen (%)	35	34	32,5	30	27,8	26,7	26,7	26
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persen (%)	40	45	45	45	50	50	50	55
1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Persen (%)	15	15	15	15	15	15	15	15
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	40	40	50	50	50	50	50	50
1.10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	orang	130	150	150	150	170	170	170	170
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	130	150	150	150	170	170	170	170

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.12.	Rasio lulusan S1/S2/S3	Rasio	10	10	15	16	16	17	17	17
1.13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	Persen (%)	50,32	50,32	55,82	61,12	72,15	66,62	66,62	66,62
1.14	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	Persen (%)	N/A	15	17	20	24	28	28	30
1.15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen (%)	2,10	2,09	2,06	2,00	1,95	1,90	1,90	1,90
1.16	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Persen (%)	20	20	23	25	26	27	27	27
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen (%)	30	30	35	40	45	50	50	55
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen (%)	5	5	8	11	14	17	17	20
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen (%)	50	50	52	54	56	58	58	60
2.4.	Rasio KDRT	Persen (%)	4	4	3,5	3	2,5	2	2	1,5
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	Persen (%)	5	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen (%)	40	40	42	44	46	48	48	50
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen (%)	0	0	15	25	35	45	45	55
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen (%)	5	5	15	25	35	45	45	55
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen (%)	0	5	15	25	35	45	45	55
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen (%)	1	5	15	25	35	45	45	55
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang	Persen (%)	1	5	15	25	35	45	45	55

[illegible]

[illegible]

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen (%)	80	84	88	93	97	102	102	102
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	280	295	309	325	340	357	357	357
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	15	16	17	18	19	20	20	20
7.4.	Persentase LSM aktif	Persen (%)	30	32	34	36	38	40	40	40
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	Persen (%)	133	139	147	154	162	170	170	170
7.6.	Persentase PKK aktif	Persen (%)	2.000	2.100	2.205	2.315	2.431	2.552	2.552	2.552
7.7.	Persentase Posyandu aktif	Persen (%)	2.591	2.720	2.856	2.999	3.149	3.307	3.307	3.307
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	orang	300	315	331	347	365	383	383	383
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
8.1.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Tahun	2.68	2.68	2.65	2.63	2.61	2.59	2.59	2.59
8.2.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (<i>Age Spesific Fertility Rate / ASFR 15-19</i>)	<i>Age Spesific Fertility Rate / ASFR 15-19</i>	47/1000	47/1000	46/1000	45/1000	44/1000	43/1000	43/1000	43/1000
8.3.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / <i>Modern Contraceptive (mCPR)</i>	Persen (%)	22.4	22.4	22.6	22.8	23	23.2	23.2	23.2
8.4.	Presentasi <i>Kebutuhan Ber KB</i> yang tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persen (%)	22.5	22.5	22.4	22.3	22.2	22.10	22.10	22.10
8.5.	Presentasi Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen (%)	93.1	93.1	93.2	93.3	93.40	93.50	93.50	93.5
9.	Perhubungan									
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Penumpang/Tahun	1.102.965	1.350.000	1.600.000	1.850.000	2.100.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000/tahun
9.2.	Rasio ijin trayek	Rasio	0,0001	0,0012	0,0101	0,0837	0,6960	5,7845	5,7845	5,7 dari total trayek aktif
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	0	100	120	144	173	207	207	207/tahun
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	Unit	2 P, 9 B, 1 T	3 P, 11 B, 2 T	3 P, 13 B, 3 T	4 P, 13 B, 4 T	4 P, 14 B, 5 T	5 P, 15 B, 6 T	5 P, 15 B, 6 T	5 Pelabuhan, 15 Bandara, 6 Terminal Bis
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	Persen (%)	0	10	20	30	40	50	50	50% wilayah terlayani
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen (%)	0	10	25	45	65	80	80	80% Kendaraan umum memiliki KIR
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	Persen (%)	51,92	61,58	71,24	80,89	90,55	100	100	963 unit rambu lalu lintas

[illegible]

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.1.	Meningkatnya Produksi Pertanian Produksi Padi	Ton	6.072,38	3.000,00	3.000,00	3.037,50	3.045,00	3.060,00	3.060,00	3.067,50
2.2.	Produksi Jagung	Ton	9.018,61	7.000,00	7.000,00	7.087,50	7.105,00	7.140,00	7.140,00	7.157,50
2.3.	Produksi Bawang Merah	Ton	9.904	1,2	1,8	7.087,50	7.105,00	7.140,00	7.140,00	7.157,50
2.4.	Produksi Cabai	Ton	46,07	1,20	1,20	1,22	2,22	1,22	1,22	1,23
2.5.	Produksi Kelapa	Ton	3.214,70	60,00	60,00	60,75	60,90	61,20	61,20	61,35
2.6.	Produksi Kakao	Ton	484	5.000,00	5.000,00	5.062,50	5.075,00	5.100,00	5.100,00	5.112,50
2.7.	Produksi Kopi	Ton	2.799	20,00	20,00	20,25	20,30	20,40	20,40	20,45
2.8.	Produksi Ubi Jalar	Ton	109,5							
2.9.	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / Kawasan Pertanian Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	2.000	2.500,00	2.500,00	2.537,50	2.550,00	2.556,67	2.556,67	2.557,00
2.10	Produksi Hasil Ternak Besar/Kecil/Unggas	Ton	2.800	30,00	30,00	30,38	30,45	30,60	30,60	30,68
2.11	Produksi Telur	Ton	5.361.372,51	10,00	10,00	10,13	10,15	10,20	10,20	10,23
2.12	Laju Pertumbuhan PDRE Tanaman Pangan (%)	Persen (%)	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
2.13	Laju Pertumbuhan PDRE Hortikultura (%)	Persen (%)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2.14	Laju Pertumbuhan PDRE Perkebunan (%)	Persen (%)	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
2.15	Laju Pertumbuhan PDRE Peternakan		6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
2.16	Nilai Tukar Petani (NTP) (%)	Persen (%)	98,68	102,65	103,66	104,67	105,20	106,10	106,10	107,70
3.	Kehutanan									
3.1.	Jumlah dokumen inventarisasi hutan tingkat provinsi	dokumen	0	0	4	4	4	4	4	4
3.2.	Jumlah permohonan PBPHH bukan kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	permohonan	1	1	1	1	1	1	1	1
3.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Persen (%)	10	10	15	20	25	30	30	30
3.4	Jumlah kelompok tani hutan yang mandiri yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan serta persentase peningkatan kelas kelompok usaha perhutanan sosial	Kelompok	10	10	15	20	25	30	30	30
3.5	Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitas	penyuluh	10	10	10	10	10	10	10	50
3.6	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	dokumen	0	0	10	15	20	25	25	25

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	serta persentase tutupan lahan pada sepadan sungai									
3.7	Jumlah SDM Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Yang Ditingkatkan	orang	0	0	5	6	7	8	8	8
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral									
4.1.	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	kWh	315	315	450	450	450	450	450	450
4.2.	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*		90	90	87	86	84	82	82	80
4.3.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) - Kumulatif	Persen (%)	23,19	23,19	24	24,7	25	25,8	25,8	25,8
4.4	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) - Tahunan	Persen (%)	39,10	39,10	40	42	44	46	46	46
5.	Perdagangan									
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	komoditas	N/A	1	1	1	2	2	2	2
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok	N/A	10	20	30	40	50	50	50
5.3	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	N/A	1	1	2	2	3	3	3
6.	Perindustrian									
6.1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen (%)	0	7	10	13	15	17	17	20
6.2	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen (%)	0	7	10	13	15	17	17	20
6.3	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	Persen (%)	0	50	55	60	70	80	80	90
7.	Transmigrasi									
7.1.	Persentase transmigran swakarsa	Persen (%)	25	30	35	40	45	50	50	55
8.	Kelautan dan Perikanan									
8.1.	Produksi perikanan tangkap	ton	163,644	164.000	165.000	166.000	167.000	167,500	167,500	168.000
8.2.	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	6,37	12,16	12,16	12,28	12,31	12,34	12,34	12,43
8.3.	Konsumsi ikan	(kg/ Kap/th)	41,83	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
8.4.	Kawasan Konservasi daerah yang Operasional (Ha)	Ha	1,7	624.106,47	624.106,47	624.106,47	624.106,47	624.106,47	624.106,47	624.106,47
8.5.	Kepatuhan Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	Persen (%)	N/A	16,00	16,00	16,16	16,20	16,24	16,24	16,32

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen (%)	13,96%	15,50%	17%	20%	25%	27,50%	27,50%	30%
	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pendapatan	Persen (%)	N/A	20%	25%	50%	50%	75%	75%	100%
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persen (%)	25%	25%	35%	50%	50%	75%	75%	100%
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
3.1.	Penilaian Indeks Sistem Merit	Nilai	160	179	200	250	250	300	300	300
3.2.	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen (%)	70	76	80	80	90	90	90	90
3.3.	Persentase Disparitas Data/Informasi ASN	Persen (%)	40	30	25	20	15	10	10	10
3.4.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	41	65	71	80	81	85	85	85
3.5.	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3.6.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	hari	5	15	15	20	20	20	20	20
3.7	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen (%)	20	25	30	35	40	45	45	45
3.8	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen (%)	20	25	30	35	40	45	45	45
3.9	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah	31	31	38	38	38	38	38	38
3.10	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	448	448	600	600	600	600	600	600
3.11	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jumlah	20	20	25	30	40	50	50	50
4.	Penelitian dan pengembangan									
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen (%)	0	10	11	12	13	14	14	15
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen (%)	0	10	11	12	13	14	14	15
	Penerapan SIDA:									
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen (%)	0	10	12	13	14	15	15	16
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen (%)	0	10	12	13	14	15	15	16

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.	Sekretariat Daerah									
5.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	B	A	A	A	A	A	A	A
5.2	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	B	A	A	A	A	A	A	A
5.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/a	1,76	2,51	3,26	4,00	4,00	4,00	4,00
5.4	Tingkat Pemahaman OPD terhadap Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi	Persen (%)	N/a	30	60	75	90	100	100	100
5.5	Tingkat Pemahaman OPD terhadap Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persen (%)	N/a	30	60	75	90	100	100	100
5.6	Tingkat Kerja sama Daerah	Persen (%)	N/a	40	60	75	90	100	100	100
5.7	Tingkat Penyelesaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	N/a	60	80	100	100	100	100	100
5.8	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Fasilitas Kepala Daerah Tingkat Provinsi	Persen (%)	N/a	70	80	90	100	100	100	100
5.9	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Pengembangan Otonomi Khusus dan Penataan Urusan	Persen (%)	N/a	20	50	80	100	100	100	100
5.10	Tingkat pemahaman penerima manfaat otonomi khusus	Persen (%)	N/a	60	70	80	90	100	100	100
5.11	Tingkat keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Urusan Bina Spiritual	%	N/a	80	90	100	100	100	100	100
5.12	Tingkat Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM/ Aneka Usaha)	Jumlah	N/a	100	150	200	250	300	300	300
5.13	Tingkat Pengelolaan Dokumen Administrasi Pembangunan	%	N/a	70	80	90	100	100	100	100
5.14	Tingkat Efektivitas PBJ Pemerintah	%	N/a	100	100	100	100	100	100	100
5.15	Tingkat Efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ	%	N/a	3,00%	3,10%	3,20%	3,30%	3,50%	3,50%	3,50%
5.16	Persentase OPD dalam mengumumkan RUP	%	N/a	100	100	100	100	100	100	100
5.17	Persentase OPD dalam mengumumkan RUP	%	N/a	60	60	65	65	70	70	70
5.18	Persentase pemenuhan formasi	%	N/a	0	40	80	100	100	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Jabatan Fungsional PBJ									
5.19	Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ berdasarkan penilaian LKPP	Indeks	4	5	6	8	9	9	9	9
5.20	Persentase penyelesaian permasalahan PBJ yang ditangani melalui advokasi	%	80	85	90	92	95	95	95	95
5.21	Tingkat Penyelesaian Permohonan Bantuan Hukum	%	50	60	75	90	100	100	100	100
5.22	Tingkat Penyusunan Peraturan Gubernur	%	44	60	75	90	100	100	100	100
5.23	Jumlah Produk Hukum Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus	%	10	50	70	90	100	100	100	100
5.24	tingkat ketersediaan produk hukum di jdih	%	60	80	100	100	100	100	100	100
5.25	Tingkat Penyelesaian Fasilitasi Produk Hukum delapan Kabupaten/kota di Provinsi Papua Tengah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.26	Rasio pembinaan dan pengawasan produk hukum di delapan kabupaten di Papua Tengah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Pengawasan									
6.1.	Persentase tindak lanjut temuan	Persen (%)	49	60	65	70	75	80	80	80
6.2.	Persentase pelanggaran pegawai	Persen (%)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6.3.	Jumlah temuan BPK	Temuan	15	35	25	20	20	15	15	15
7.	Sekretariat Dewan									
7.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Persen (%)	N/A	55	60	65	70	75	75	80
7.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Persen (%)	N/A	80	82	83	84	85	85	86
7.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen	Persen (%)	N/A	80	82	83	84	85	85	86

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD									
7.4	Jumlah Dokumen SAKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persen (%)	N/A	7	8	8	8	9	9	9
7.5	Jumlah laporan tindak lanjut hasil audit	Persen (%)	N/A	1	1	1	1	1	1	1
8.	Majelis Rakyat Papua									
8.1	Terlaksanya Pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh MRP bersama-sama dengan Gubernur	Jumlah	0	2	3	3	4	5	5	5
8.2	Jumlah Penyelesaian Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Jumlah	0	8	4	4	4	4	4	4
8.3	Jumlah Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama, Pemberdayaan Perempuan serta Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Jumlah	0	8	8	8	8	8	8	8
8.4	Jumlah Sosialisasi Dalam Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945	Jumlah	0	2	2	2	2	2	2	2

Sumber Data : Hasil Kesepakatan Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah, 2025

BAB V PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 berpedoman pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. RPJMD Provinsi Papua Tengah Periode 2025-2029 merupakan Tahap I (Pertama) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045. Kedudukan RPJMD dalam RPJPD sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari suatu periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. RPJPD Tahun 2025-2029 dilaksanakan dalam empat tahapan RPJMD, yang masing-masing tahapan telah pula memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan. Kedudukan RPJMD Papua Tengah Tahun 2025-2029 juga merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah setiap tahunnya. RPJMD juga merupakan pedoman bagi perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah.

Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 akan berakhir pada 20 Februari 2030. Sementara itu dokumen RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 akan berakhir pada bulan Desember 2030. Oleh karena itu untuk menjamin adanya kesinambungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dan memastikan, bahwa pada akhir periodisasi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029, dokumen RPJMD ini tetap menjadi Acuan regulasi, maka ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2030-2035 melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2030 yang didasarkan pada RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029;
2. Sambil Menunggu penetapan Peraturan Daerah Provinsi papau tengah Tahun 2030 tentang Rencana Pembngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2030-2035, maka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2030 berpedoman pada RPJMD 2025-2029 dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2030;
3. Tahun pertama dari RPJMD Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029, yaitu 2026 dan seterusnya untuk selama 5 (lima) tahun;
4. Dalam hal penyusunan RKPD tahun 2030 makan akan disusun pada tahun 2029 di mana masih masuk periode RPJMD 2025-2029, sehingga dokumen RKPD 2030 nanti menjadi bagian yang tidak terpisah dengan RPJMD 2030-2035.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalin dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 dijadikan sebagai landasan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan ke dalam dokumen rencana pembangunan tahunan Provinsi Papua Tengah untuk selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2026 sampai dengan 2030, termasuk dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk selama 5(lima) tahun ke depan.

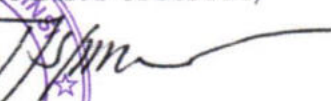
Berkaitan dengan itu, maka dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 perlu dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan seluruh pemangku kepentingan seperti masyarakat umum, dunia usaha, para akademisi dan seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 dengan penuh tanggung jawab;
2. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan bersinergi dengan dokumen RPJMN Pemerintah Pusat Tahun 2025-2029;
3. Untuk menjamin agar target capaian setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029;
4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) Provinsi Papua Tengah berkewajiban untuk menjabarkan RPJMD ke dalam dokumen Renstra PD dan Renja PD;
5. Dalam upaya menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029, maka Bapperida Provinsi Papua Tengah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh PD dalam perumusan rencana pembangunan daerah;
6. Sesuai Pasal 43 dan 46 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap setiap dokumen rencana (Renstra dan Renja PD) yang disusun oleh seluruh PD;

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002